

Buletin La'ó Hamutuk

Vol. 8, No. 1

Maret 2007

Dana Perminyakan Timor-Leste

Banyak negara Dunia Ketiga yang kaya akan sumber minyak* menghadapi berbagai persoalan ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Meskipun rakyat mereka berharap bahwa pengembangan perminyakan akan memberikan keajaiban ekonomi, yang sering mereka dapatkan hanyalah bencana. Ini kadang-kadang disebut “Paradoks Kekayaan” atau “Kutukan Sumberdaya.”

Pada Tahun 2005, pemerintah Timor-Leste membentuk Dana Perminyakan untuk mencegah Timor-Leste mengikuti jalan menuju bencana itu. Undang-undang ini memprioritaskan manajemen yang berkelanjutan terhadap pendapatan perminyakan untuk bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Sebuah perspektif esensial untuk menghindari kutukan sumber daya. *La'ó Hamutuk* percaya bahwa Dana Perminyakan adalah sebuah langkah positif menuju penciptaan landasan yang kuat bagi negara kita.

Undang-Undang Dana Perminyakan mengatur mengenai relasi dan tanggungjawab dari institusi-institusi publik, termasuk pemerintah, parlemen, Bank Sentral dan Dewan

* *Istilah teknis dalam artikel ini dijelaskan dalam bagian “Daftar Istilah” halaman 10 dan digaribawahi beberapa kali penggunaannya.*

Penasihat, serta mengimplementasikan langkah-langkah untuk transparansi, kontrol dan pertanggungjawaban. Ini akan membantu dalam mengurangi risiko sebagai langkah dasar menuju transparansi, pengontrolan dan akuntabilitas. Ini juga akan membantu untuk mengurangi risiko malapetaka dari kekayaan kita.

Tetapi dengan Undang-Undang Dana Perminyakan saja, tidak menyelesaikan semua persoalan. Ada banyak penyebab dari malapetaka kekayaan (Baca *Buletin La'ó Hamutuk*, Vol. 6 No. 4 dan Vol. 5 No. 3-4) dan Dana Perminyakan hanya berhubungan dengan beberapa dari sekian banyak persoalan. Ini akan membutuhkan lebih banyak hal untuk memperbaikinya sebagai jalan menuju kepada kemakmuran.

Selama tahun pertama beroperasinya Dana Perminyakan, beberapa hal positif telah dilakukan, meskipun banyak hal yang belum diimplementasikan secara sempurna. Tulisan ini akan membahas persoalan-persoalan mendasar seperti; struktur dan mekanisme Dana Perminyakan Timor-Leste, dan bagaimana Dana ini beroperasi sampai sekarang dan juga beberapa persoalan rancangan undang-undang ini. Kami akan menjelajahi seberapa besar Dana ini bisa membantu Timor-Leste menghindari kutukan sumberdaya, dan mengusulkan sejumlah perbaikan dan tindakan tambahan yang bisa diambil.

(bersambung ke halaman 2)



João Sarmiento dari *La'ó Hamutuk* berusaha mengunjungi tempat penyimpanan Dana Perminyakan Timor-Leste pada bulan Desember 2005. Ia tidak diperbolehkan masuk.

Daftar isi . . .

Daftar Istilah Dana Perminyakan	10
Dana Perminyakan Timor-Leste dan Norwegia	12
Kembalikan Kekayaan Alam Kami	14
Pertemuan Publik tentang Perjanjian CMATS	16
Pertemuan Publik tentang Kerjasama PNTL-UNPOL	17
Pelajaran untuk PBB dari Timor-Leste	18
Editorial: Undang-undang Pensiun yang Rakus	24

La'ó Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-Leste

P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste

Mobile +(670)7234330 Telepon +(670)3325013

Email: info@laohamutuk.org Situs/Web: www.laohamutuk.org

Persoalan

Kutukan sumberdaya adalah hasil dari banyak faktor: kerakusan, korupsi dan kronisme dalam pemerintah nasional dan perusahaan minyak internasional, keinginan negara-negara kuat untuk menguasai pasokan minyak untuk memperlancar arus minyak dari negara-negara Dunia Ketiga ke negara-negara industri maju, lembaga-lembaga negara yang lemah serta transparansi dan pertanggungjawaban yang rendah di dalam pemerintah. Lebih memperparah lagi, harga penjualan minyak dan gas di dunia yang sangat fluktuatif, yang berarti bahwa pendapatan minyak berbeda-beda dari tahun ke tahun dan mustahil untuk diperkirakan.

Kecenderungan alamiah kebanyakan pemerintah (dan kebanyakan orang) adalah membelanjakan semua yang tersedia. Ini berarti membelanjakan pendapatan minyak setiap tahun ketika pendapatan masuk, sehingga ada keseimbangan anggaran pemerintah dan, tanpa surplus. Karena pendapatan dari minyak mudah datang, pemerintah-pemerintah sering mengabaikan sektor perekonomian yang lain. Pendapatan dari penjualan cadangan minyak, (kadang-kadang disebut "rente,") mengalir dengan sangat mudah sehingga para pembuat kebijakan seringkali mengabaikan pembangunan sektor ekonomi lain yang lebih sulit untuk menghasilkan pendapatan.

Lebih lanjut, minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Minyak dan gas Timor-Leste akan habis dalam satu atau dua generasi, dan kalau bagian-bagian lain perekonomian kita tidak berkembang, termasuk prasarana manusia dan fisik, keadaan kita bisa lebih buruk dibandingkan hari ini. Kemampuan mencukupi kebutuhan negeri ini akan berkurang, dengan kemampuan pertanian dan kemajuan ekonomi yang rendah, tetapi kebutuhan mengimpor barang-barang lebih tinggi. Sekarang, pemerintah kita harus meningkatkan perkembangan sektor-sektor sebagai tambahan untuk minyak dan gas, agar bisa mengurangi ketergantungan kita pada pendapatan dari minyak dan mempersiapkan diri untuk masa depan.

Timor-Leste adalah negara yang muda dan miskin, dan perkembangan ekonomi kita yang terbatas sejauh ini mengandalkan pada bantuan dari negara-negara donor. Untuk beberapa dasawarsa mendatang, pendapatan dari minyak dan gas akan menjadi sumber dana utama Pemerintah, memberikan sekitar 95% dari pendapatan pemerintah Timor-Leste. Meskipun pendapatan minyak dan gas bisa memudahkan pembiayaan program-program pemerintah, pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa Timor-Leste harus sangat berhati-hati.

Keamanan dalam negeri kita terancam oleh pengangguran yang besar, tetapi pengambilan minyak nyaris tidak menciptakan pekerjaan untuk penduduk setempat. Kita perlu menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai program-program untuk memberikan pekerjaan kepada penduduk, merangsang kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan kehidupan penduduk tidak hanya di Dili tetapi juga di kawasan pedesaan dimana kebanyakan orang bertempat tinggal.

Ini sangat problematis karena kenyataan sosial dan ekonomi di Timor-Leste, dimana kegiatan ekonomi selain minyak dan gas sangat rendah. Pengangguran di Dili, yang merupakan salah satu sebab dari krisis sekarang ini, adalah sekitar 40%. Penduduk kita tumbuh lebih dari 3% setiap tahun, yang berarti

bahwa penduduk akan dua kali lipat banyaknya dalam waktu kurang dari 25 tahun. Ini penting karena pengeluaran pemerintah untuk – kesehatan, pendidikan, keamanan dalam negeri, dan sebagainya – harus ditingkatkan dalam proporsi yang setara dengan pertumbuhan penduduk agar bisa memberikan tingkatan pelayanan yang sama.

Lebih jauh, Timor-Leste punya beberapa keterbatasan yang terkait dengan pengelolaan proyek-proyek dan pendapatan perminyakan. Lembaga-lembaga negara kita masih lebih kecil dan lemah, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan minyak internasional dan kekuatan-kekuatan ekonomi global. Setelah beberapa abad pengabaian Portugis dan korupsi serta pendudukan Indonesia, rakyat kita terbatas pengalamannya mengenai akses publik pada informasi dan kekuasaan hukum.

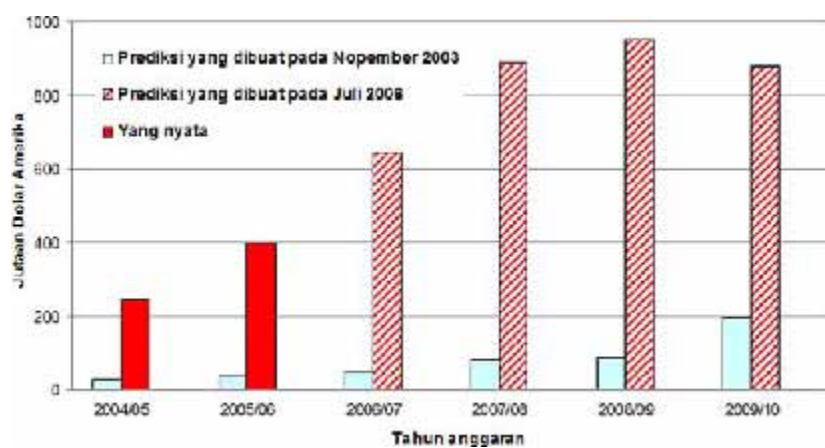
Krisis Timor-Leste sekarang ini mempertunjukkan betapa sulit bagi rakyat dan pemimpin kita untuk melakukan peralihan dari perlawanan terhadap rezim pendudukan asing yang menindas menuju kepada partisipasi dalam sebuah negara yang demokratis, dan merdeka yang melayani kepentingan rakyat. Pada masa Indonesia, adalah tindakan patriotis bagi pegawai-pegawai negeri mencuri atau mengacaukan pemerintah pendudukan untuk mendukung perlawanan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sangat luas, tanpa penerapan kekuasaan hukum yang konsisten. Seorang Timor-Leste tidak punya hak dan tidak punya suara dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yang diputuskan oleh para jenderal otokratis Indonesia.

Hari ini, pejabat-pejabat pemerintah dan para pegawai negeri banyak yang kurang pengalaman atau pengetahuan mengenai transparansi dan pertanggungjawaban, yang sangat mutlak untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak bisa mengandalkan pada niat baik para pemimpin kita, tetapi harus punya pengawasan dan pengimbangan legal, serta transparansi, sehingga masyarakat sipil bisa menjamin bahwa pemerintah melayani kepentingan rakyat.

Meskipun harga minyak dunia sekarang tinggi, harganya sangat fluktuatif (berubah-ubah) dan tidak bisa diperkirakan dalam jangkauan yang sangat luas. Pada empat pertama kemerdekaan Timor-Leste, harganya telah tiga kali lipat, dan kemudian jatuh 30% dalam enam bulan terakhir. Meskipun ada kemungkinan bahwa akan meningkat selama



Grafik 2: Prediksi Pendapatan Perminyakan Tahunan RDTL



Sumber: Makalah Latar Belakang (perbaikan anggaran tengah tahunan) untuk pertemuan Mitra Pembangunan Des. 2003; Anggaran RDTL 2006-2007.

berdasawarsa-dasawarsa, harganya bisa menurun secara signifikan untuk periode beberapa tahun. Ini yang membuat mustahil untuk memprediksikan berapa pendapatan minyak Timor-Leste satu tahun dari sekarang.

Proses perencanaan Timor-Leste sendiri memperlihatkan persoalan ini. Pada bulan November 2003, Pemerintah memproyeksikan bahwa pendapatan minyak dan gas pada tahun 2004-2005 besarnya \$25 juta, meningkat menjadi \$34 juta pada 2005-2006 dan \$58 juta pada 2006-2007.

Sekarang kita tahu bahwa pendapatan minyak dan gas tahun 2004-2005 adalah \$243 juta, 10 kali proyeksi yang dibuat kurang dari dua tahun sebelumnya. Tahun 2005-2006 pendapatan ini jumlahnya \$403 juta (12 kali proyeksi). Bulan Juli 2006, Pemerintah memproyeksikan bahwa pendapatan berjumlah \$643 juta untuk tahun 2006-2007 dan sekitar \$900 juta per tahun pada tiga tahun selanjutnya (lihat grafik 2). Setiap bulan, Pemerintah Timor-Leste menerima uang minyak yang lebih banyak daripada perkiraan untuk seluruh tahun yang dibuat hanya pada tiga tahun yang lalu.

Meskipun rejeki yang tak disangka-sangka ini akan membantu Timor-Leste dalam krisis sekarang ini, para perencana dan warganegara kita tidak boleh berharap ini berlanjut tanpa batas waktu. Di seluruh dunia, negara-negara yang membelanjakan terlalu banyak ketika pendapatan minyak tinggi, kemudian harus meminjam untuk melanjutkan program-program pemerintah ketika harga minyak turun. Dana Perminyakan dapat membantu kita untuk menghindari jebakan ini.

Sejak 1999, banyak negara asing dan lembaga internasional memberikan nasehat kepada Timor-Leste tentang pengelolaan pendapatan dari minyak dan gas. Meskipun nasihat tersebut sering membantu, kebanyakan darinya didorong oleh keinginan negara-negara pengguna minyak (pembeli minyak Timor-Leste di negara-negara industri kaya, seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Utara) untuk menjamin pasokan minyak dan gas mereka sendiri. Pasokan minyak menjadi berbahaya ketika satu negara penghasil minyak (seperti Irak atau Nigeria) hancur karena konflik atau kalau pemerintah atau warganegara mereka menjadi begitu frustrasi karena tidak mendapatkan jatah yang adil dari penghasilan minyak sehingga mereka mengarahkan kemarahan mereka pada proyek-proyek minyak.

Rakyat Timor-Leste juga akan mendapatkan manfaat kalau negara kita menghindari persoalan-persoalan ini, tetapi kita harus ingat bahwa tujuan utama kita untuk mengeksport minyak dan gas adalah memberi manfaat warganegara kita. Karena itu, kita harus menganalisis dan menyesuaikan nasihat dari Bank Dunia dan organisasi-organisasi yang diarahkan oleh negara kaya lain untuk menjamin memenuhi kebutuhan Timor-Leste.

Minyak untuk Perekonomian Timor-Leste

Timor-Leste punya cadangan minyak yang besar, tetapi produksi minyak dan gas kita dibanding penduduk hanyalah seperdelapan dari Norwegia, Kuwait, atau Brunei Darussalam. Minyak dan gas Timor-Leste terbatas dan akan habis dalam jangka waktu umur orang yang sekarang hidup.

Mulai 2008 dan selama beberapa dasawarsa selanjutnya, Timor-Leste akan menjadi salah satu negara yang paling tergantung pada minyak di dunia ini. Berdasarkan angka-angka Pemerintah dan IMF, *La' o Hamutuk* menghitung bahwa 89% perekonomian total kita (Produk Domestik Bruto atau PDB) dan 94% pendapatan Pemerintah akan berasal dari ekspor minyak dan gas. (Baca *Buletin La' o Hamutuk*, Vol. 6, No. 4, Nopember 2005.)

Dengan meningkatnya harga, Pemerintah Timor-Leste menerima lebih dari US\$ 80 juta setiap bulan dari pendapatan ladang minyak dan gas Bayu-Undan di Laut Timor. Jika Greater Sunrise dikembangkan, Timor-Leste akan mendapatkan lebih banyak pendapatan dari ladang Greater Sunrise yang akan dimulai dalam waktu 5-10 tahun, meskipun Australia akan mengambil lebih dari bagian legalnya. (Baca *Buletin La' o Hamutuk*, Vol. 7 No. 1, April 2006.) Meskipun pendapatan Bayu-Undan akan habis sekitar 2025, produksi Greater Sunrise bisa berlangsung sampai 2050.

Negara-negara Dunia Ketiga yang tergantung pada sumber alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak dan gas selalu mengalami bencana, yang mencakup kelaparan, militerisme, polarisasi ekonomi, korupsi, perusakan lingkungan, dan pengangguran. Ini harus menjadi sebuah peringatan bagi Pemerintah dan rakyat Timor-Leste. Sejumlah tindakan perlu diambil, dan pembentukan Dana Perminyakan dapat mengurangi sebagian dari bahaya ini. Pemerintah Timor-Leste sedang belajar dari pengalaman-pengalaman lain, tetapi pelajarannya sulit dan rumit.

Apa itu Dana Perminyakan?

Dana Perminyakan adalah sebuah mekanisme untuk membuat pendapatan minyak lebih konsisten dan bisa diperkirakan dari tahun ke tahun, dan untuk menabung sebagian pendapatan dari minyak dan gas untuk waktu ketika semua minyak dan gas Timor-Leste telah diambil. Pada saat ini, bunga dari investasi Dana Perminyakan akan terus membiayai operasi Pemerintah. Di satu sisi, ini baik untuk keberlanjutan keuangan, tetapi di sisi lain, ini akan memperlama masa ketergantungan Timor-Leste pada pendapatan minyak, yang memfasilitasi pengabaian sektor-sektor lain perekonomian kita.

Pada prinsipnya, Undang-Undang Dana Perminyakan Timor-Leste melaksanakan Pasal 139 Konstitusi RDTL, yang menyebutkan bahwa sumber alam dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kepentingan nasional, termasuk untuk membentuk cadangan keuangan. Undang-undang ini berdasarkan beberapa asas, termasuk pengelolaan yang bijaksana untuk keuntungan generasi sekarang dan masa mendatang, dan kebijakan fiskal yang baik.

Semua pendapatan dari pembangunan perminyakan, termasuk royalti (FTP) dan pajak, akan ditabung secara langsung dalam rekening Dana Perminyakan ketika mereka menerimanya. Dana ini diinvestasikan dalam risiko keamanan yang rendah, dan semua bunga yang diterima akan ditabung kembali dalam rekening Dana Perminyakan.

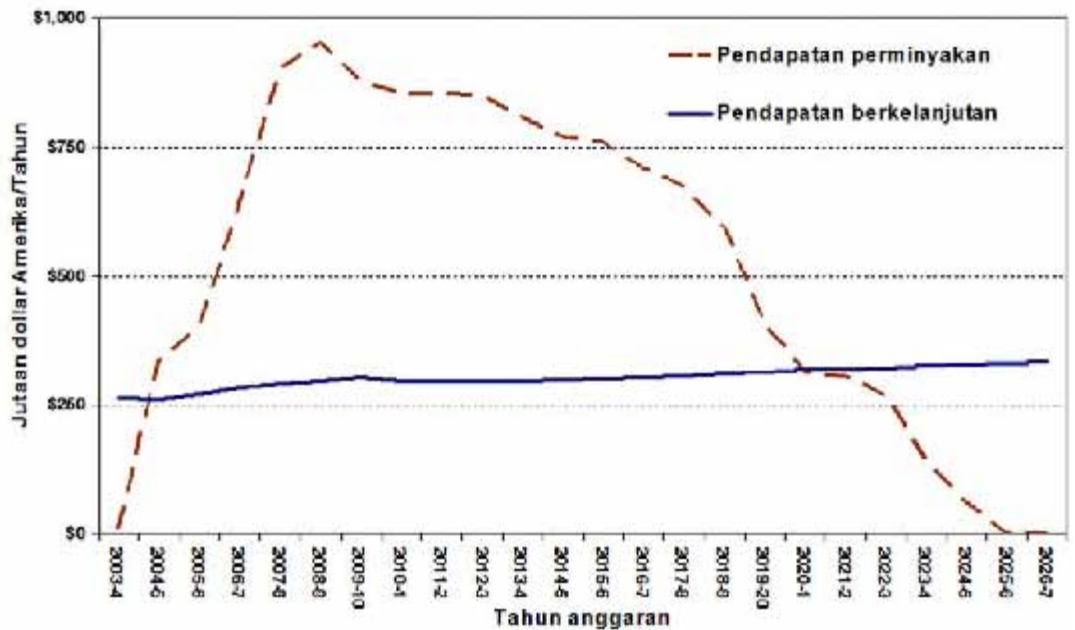
Setiap tahun, Parlemen akan mentransfer uang dari Dana Perminyakan untuk mengisi defisit anggaran pemerintah, dan menutup perbedaan antara komitmen pengeluaran pemerintah dan pendapatan dari sumber lain. Demi keberlanjutan dana ini untuk generasi berikutnya, jumlah yang diambil harus kurang dari Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (Estimated Sustainable Income -- ESI) yang dihitung bahwa bisa diambil setiap tahunnya tanpa menghabiskan keseimbangan jangka panjang dari Dana Perminyakan. Untuk tahun anggaran ini (2006-2007), Pemerintah telah mengestimasi pendapatan berkelanjutan pada \$283,3 juta US, lebih besar dari \$259,7 juta USD untuk diambil dari Dana Perminyakan.

Grafik di atas memperlihatkan proyeksi pendapatan dari ladang Bayu-Undan (garis putus) dan ESI (garis tidak putus) untuk dua puluh tahun mendatang. Ini adalah estimasi yang mendekati, karena tidak seorang pun tahu berapa harga atau tingkat bunga dunia di masa mendatang. Akan tetapi, kita bisa melihat bahwa meskipun pendapatan minyak dan gas berakhir pada 2025, Dana ini akan terus menghasilkan pendapatan berkelanjutan lebih dari \$300 juta per tahun.

Atas nasihat dari Bank Dunia dan IMF, Pemerintah membuat satu kebijakan tabungan, bahkan sebelum Dana Perminyakan dirancang Konsultasi publik tentang konsep dan usulan Undang-Undang Dana Perminyakan dimulai pada bulan Oktober 2004, dan Parlemen menyetujui Undang-Undang ini pada tanggal 20 Juni 2005. Kemudian diumumkan oleh Presiden tidak lama kemudian, serta dana ini mulai beroperasi pada bulan September.

Dana Perminyakan Timor-Leste dibuat berdasarkan keberhasilan Norwegia dalam mengelola pendapatan minyaknya sendiri, meskipun Timor-Leste dan Norwegia

Grafik 3: Pendapatan Perminyakan tahunan dan Estimasi Pendapatan Berkelanjutan



Sumber: Diadaptasi dari Tabel 4.2, 5.1 dan informasi lain dalam Anggaran Pemerintah RDTL 2006-2007.

memiliki perbedaan besar secara sosial, ekonomi, politik, dan sejarah (Lihat tabel, halaman 12). Karena Dana Perminyakan Timor-Leste punya ketentuan tambahan untuk transparansi dan pertanggungjawaban, Pemerintah Timor-Leste menyebutnya sebagai model “Norwegia Plus.” Tetapi, dalam Dana Timor-Leste tidak ada beberapa ciri terbaik Dana Norwegia, seperti persyaratan bahwa dana tersebut diinvestasikan secara etis (menghindari investasi yang secara sosial merugikan) dan memiliki proses legal khusus untuk menggunakan uang dari dana perminyakan.

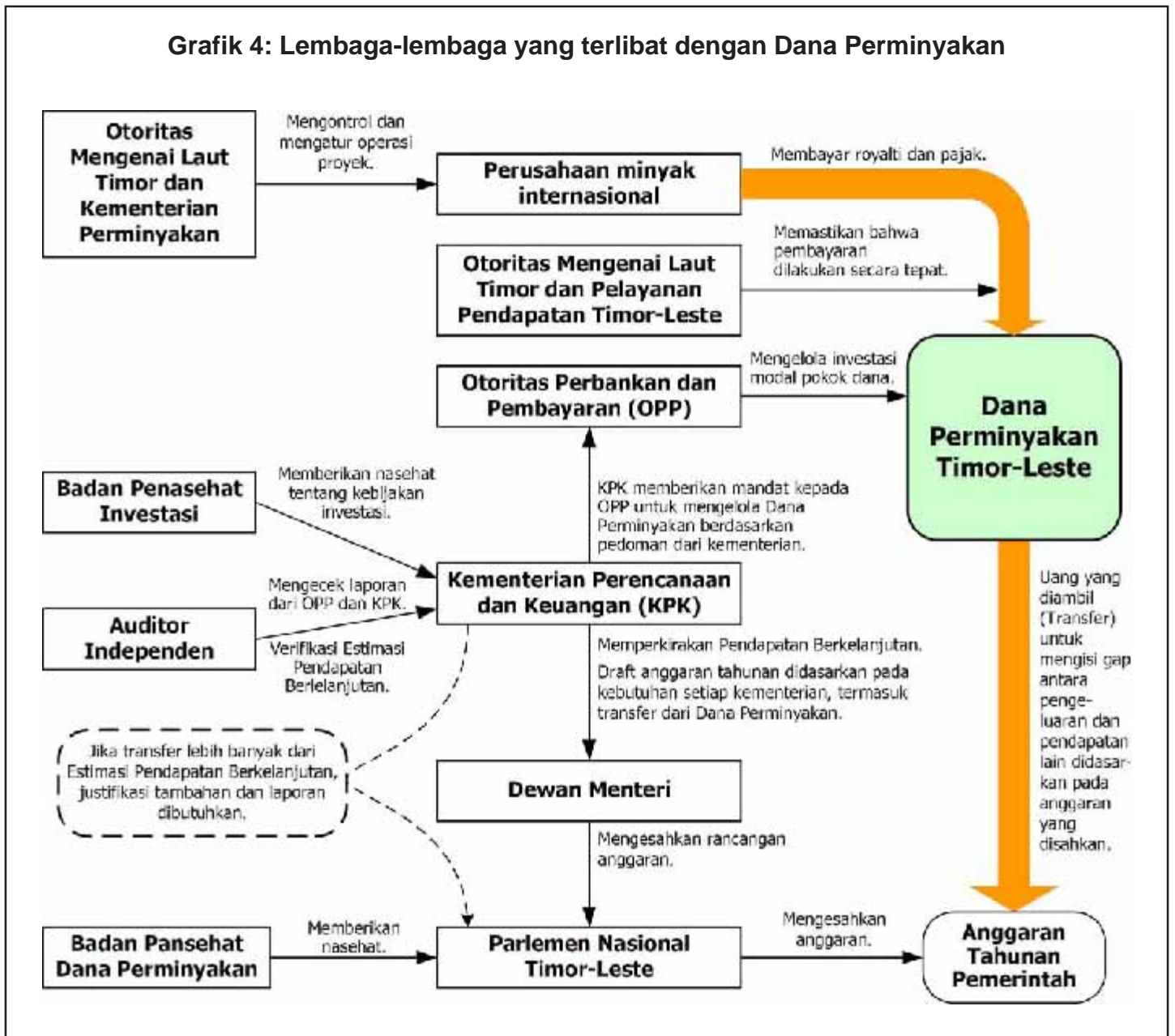
Mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri, yang memimpin pembuatan Dana Perminyakan, menyebut pengesahannya sebagai langkah yang amat sangat penting untuk masa depan bangsa: “Pengelolaan yang baik pendapatan dari minyak dan gas sangat penting untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas politik masa depan rakyat Timor-Leste. Kebijakan ini akan membuat lebih mudah bagi kita untuk menggunakan dana secara bertanggungjawab dan menabung untuk masa depan.”

Bank Dunia juga memandang pembuatan Dana Perminyakan sebagai satu keberhasilan Pemerintah Timor-Leste, dan optimistis bahwa pendapatan dari minyak dan gas tidak akan dihabiskan atau diboroskan, dan akan terus memberikan jaminan bagi generasi-generasi mendatang.

Undang-Undang Dana Perminyakan mendefinisikan pengelolaan dan peran berbagai pelaku, yang meliputi Pemerintah, Parlemen, badan pemeriksa keuangan, Badan Penasihat Investasi, dan Bank Sentral (Otoritas Perbankan dan Pembayaran – OPP/BPA). (Lihat Grafik 4). Undang-undang ini juga memberikan mekanisme untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban sebagai jalan bagi masyarakat di luar pemerintah untuk mengambil bagian melalui, Dewan Konsultasi Dana Perminyakan.

Dewan Konsultasi Dana Perminyakan (DKDP) akan

Grafik 4: Lembaga-lembaga yang terlibat dengan Dana Perminyakan



memberikan pengawasan oleh rakyat Timor-Leste mengenai bagaimana uang tersebut digunakan. Sebelum Parlemen bisa mengesahkan rencana Pemerintah untuk mengambil uang dari Dana Perminyakan, ia diharuskan meminta nasihat dari DKDP. Dewan ini mencakup wakil-wakil dari berbagai sektor dalam masyarakat kita. Masyarakat sipil memilih dua wakilnya pada bulan Februari 2006 – Thomas Freitas dari Luta Hamutuk dan Maria Dias dari Rede Feto. Bulan Agustus 2006, Parlemen memilih Antero Benedito da Silva dan Nuno Rodrigues sebagai wakil mereka, dan orang-orang lain pada Dewan ini meliputi Francisco Monteiro (dicalonkan oleh Presiden Republik Xanana Gusmão), Aurelio Guterres (dicalonkan oleh Ketua Parlemen Lu-Olo), Oscar Lima (dicalonkan oleh sektor bisnis), dan Pendeta Francisco Vasconcelos (dicalonkan oleh lembaga-lembaga keagamaan). Mari Alkatiri bertugas pada Dewan ini dalam kapasitasnya sebagai seorang mantan Perdana Menteri.

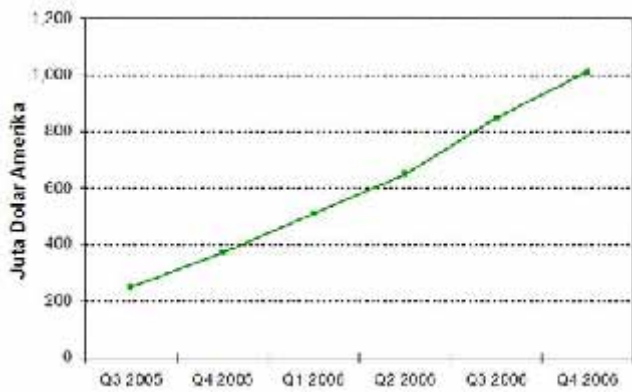
Meskipun Dewan ini harus beroperasi sejak Maret 2006, banyak pengangkatan terjadi terlambat dan baru beroperasi mulai November. Akibatnya, Dewan tidak bisa memberikan nasihat yang menjadi syarat hukum pada bulan Agustus ketika Parlemen mengesahkan anggaran negara untuk 2006-2007,

anggaran tahun ini.

Aspek penting lain Undang-Undang Dana Perminyakan adalah mendefinisikan bagaimana uang akan diinvestasikan dan siapa yang bertanggungjawab untuk mengelolanya. Pemerintah diharuskan mengelola Dana Perminyakan dengan hati-hati, berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik dan untuk keuntungan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pemerintah bertanggungjawab untuk semua aspek manajemen, yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan dan Keuangan (KPK). Pada bulan Juli 2005, Kementerian ini menandatangani sebuah kesepakatan manajemen dengan Otoritas Perbankan dan Pembayaran/BPA yang memberikan tanggungjawab kepada BPA untuk pengelolaan operasional Dana Perminyakan.

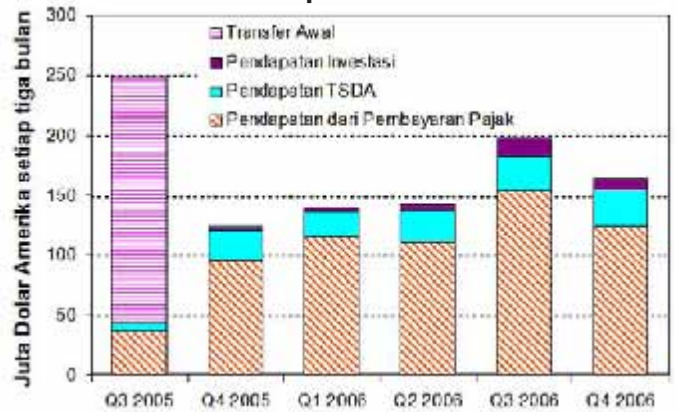
Sebelum membuat kebijakan investasi, Kementerian Keuangan harus meminta masukan dari Badan Penasihat Investasi (BPI/IAB). Badan ini telah dibentuk dan beranggotakan: Direktur Pendapatan (Manuel Monteiro), Kepala Bank Sentral (Abraão Vasconcelos), dua orang berpengalaman investasi yang diangkat oleh Menteri Keuangan (Sigurd Klakeg, Penasihat Fiskal dan Dana

Grafik 5: Saldo dalam Dana Perminyakan



Sumber: Laporan Triwulan Dana Perminyakan diterbitkan oleh OPP/BPA.

Grafik 6: Pendapatan Dana Perminyakan Setiap Triwulan



Sumber: Laporan Triwulan Dana Perminyakan diterbitkan oleh OPP/BPA.

Perminyakan, dan Tørres Trovik, Direktorat Perminyakan Norwegia), dan satu orang lagi yang diangkat oleh Kementerian (Cristino Gusmão, Direktur Makroekonomi Kementerian Perencanaan dan Keuangan).

Kesepakatan manajemen mengesahkan BPA untuk mengelola Dana Perminyakan dan membuat pengaturan untuk investasi berdasarkan pedoman dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Perencanaan dan Keuangan. BPA harus menyampaikan laporan keadaan dan kegiatan Dana Perminyakan setiap tiga bulan. Laporan ini disampaikan kepada Menteri dalam waktu 20 hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan, dan sudah harus dipublikasikan dalam waktu 20 hari sesudahnya.

Sampai sekarang, Pemerintah Timor-Leste telah mengadopsi satu strategi investasi untuk menanamkan semua uang Dana Perminyakan dalam pengamanan pemerintah Amerika Serikat, melalui Federal Reserve Bank di New York. Ini berarti bahwa Timor-Leste tidak harus menangani tingkat pertukaran uang atau memasuki risiko pasar finansial internasional yang kompetitif. Kita menerima tingkat penghasilan yang rendah untuk menghindari investasi yang berisiko atau kemungkinan kesalahan manajemen. Seperti diakui oleh BPA, pasar finansial internasional sangat rumit dan Timor-Leste belum punya sumberdaya manusia untuk memahaminya, jadi kita harus menunggu sebelum mengane-karagamkan bagaimana Dana ini diinvestasikan.

Setiap tahun, Pemerintah harus memberi Parlemen laporan tahunan mengenai Dana Perminyakan. Ini mencakup hasil audit (pemeriksaan keuangan), penerimaan dan pengambilan, neraca, pengembangan dan kegiatan Dana Perminyakan serta nasihat Badan Penasihat Investasi. Ketika tulisan ini dibuat, laporan ini belum diterbitkan.

Penerimaan minyak dan anggaran pemerintah

Rakyat Timor-Leste berharap bahwa pendapatan dari minyak Laut Timor akan digunakan secara bijaksana untuk pembangunan nasional, membantu menghapuskan kemiskinan. Meskipun kita telah menerima lebih dari satu milyar dolar dari sektor ini, ini punya dampak nyata yang kecil pada pembangunan. Hampir semua uang telah ditabung di Amerika Serikat dan sangat sedikit yang telah dikeluarkan untuk

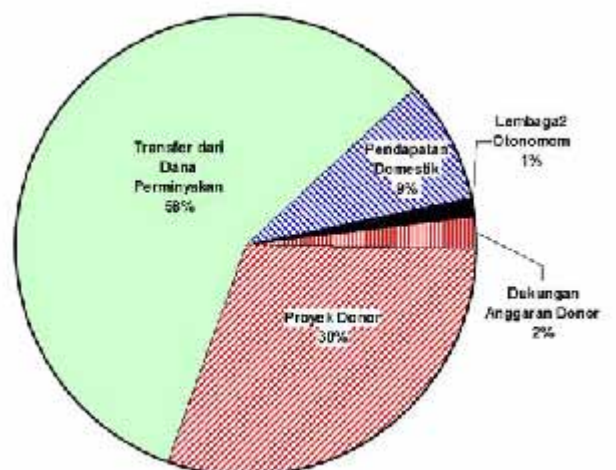
mendukung Timor-Leste. Dalam Tahun Anggaran 2005-2006, Pemerintah mengeluarkan \$84,6 juta pendapatan minyak dan gas, dan ia merencanakan mengeluarkan \$ 260 juta dari Dana Perminyakan tahun ini, tetapi pada tengah tahun pertama tahun anggaran ini (Juli-Desember 2006), tidak ada uang yang ditransfer dari Dana Perminyakan.

Grafik 5 di atas memperlihatkan neraca total Dana Perminyakan pada akhir setiap triwulan, sampai akhir 2006, ketika berisi lebih dari satu milyar dolar Amerika Serikat (\$1.011.763.807). Pendapatan meningkat secara signifikan sejak Desember 2006, setelah proyek Bayu-Undan membayar kembali perusahaan minyak untuk investasi mereka dalam proyek ini dan mulai membayar “keuntungan minyak” Pajak.

Grafik 6 menunjukkan pendapatan yang didepositokan dalam Dana Perminyakan untuk masing-masing triwulan. Kebanyakan pendapatan berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan minyak kepada Pemerintah Timor-Leste, sementara sebagian dari royalti yang dibayarkan kepada Otoritas Mengenai Laut Timor (Timor Sea Designated Authority – TSDA), 90% darinya adalah kepada Timor-

Grafik 7: Sumber Anggaran Gabungan RDTL tahun Anggaran 2006-2007

(Total \$452 Juta)



Sumber: Anggaran Pemerintah RDTL 2006-2007

Leste. Pendapatan investasi adalah bagian yang meningkat dari pendapatan Dana Perminyakan.

Dukungan donor untuk Timor-Leste berkurang, meskipun agak meningkat pada 2006-2007 karena krisis yang berlangsung. Tahun ini sumbangan seluruhnya sekitar \$146 juta, kebanyakan untuk proyek-proyek yang dikelola oleh badan-badan dari negara donor, dan diperkirakan akan berkurang tajam dalam beberapa tahun mendatang. Karena perekonomian bukan minyak di Timor-Leste belum berkembang dengan baik, pajak dalam negeri hanya memberikan sekitar \$39 juta, sehingga dana yang ditransfer dari Dana Perminyakan adalah sumber utama pendapatan (\$260 juta dari \$452 juta Sumber Anggaran Gabungan).

Kalau kita bandingkan tahun ini dengan tahun lalu dan rencana untuk tiga tahun mendatang, kita bisa melihat anggaran hampir meningkat dua kali lipat, yang peningkatannya didanai dengan transfer dari Dana Perminyakan. Tetapi karena Estimasi Penghasilan Berkelanjutan untuk tahun ini adalah \$283 juta, bahkan transfer yang besar ini diperbolehkan berdsasarkan Undang-Undang Dana Perminyakan,

Terpisah dari Dana Perminyakan, Pemerintah telah mempunyai persoalan dengan eksekusi anggaran, dan tidak mampu membelanjakan uang yang dianggarkan untuk melaksanakan program-programnya. Dan kebanyakan masyarakat tidak belum mendapatkan rencana pelayanan. Masalah ini akan menjadi lebih berat dengan meningkatnya pendapatan dan anggaran.

Sebelum Timor-Leste punya Dana Perminyakan, Pemerintah membelanjakan pendapatan pajak dari minyak dan gas secara langsung, meskipun sebagian ditabung dalam "Rekening Celah Timor" yang dibuat untuk keperluan ini pada tahun 2001. Rekening ini menerima penerimaan First Tranche Petroleum/FTP (royalti) dari ladang Elang-Kakatua dan Bayu-Undan, yang akumulasinya \$205 juta ditransfer ke rekening Dana Perminyakan pada bulan September 2005 dan rekening Celah Timor ditutup. Antara tahun 2002 hingga 2005, Pemerintah membelanjakan \$247 juta dari pendapatan perminyakan, ditambah dengan \$85 juta dalam tahun 2005-2006, dimana tidak melalui Dana Perminyakan.

Kebijakan penghematan Pemerintah, yang tertulis dalam Undang-Undang Dana Perminyakan, adalah membatasi pengeluaran tahunan uang minyak tidak lebih dari Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (ESI) Setiap tahun, ESI diperkirakan pada 3% dari nilai keseluruhan uang dalam Dana Perminyakan ditambah dengan dan proyeksi pendapatan masa depan yang akan datang dari penjualan minyak dan gas dari ladang-ladang yang sudah disahkan rencana pembangunannya. Ini memperoleh dari pertimbangan untuk "kekayaan minyak negara" termasuk uang yang berada dalam Dana Perminyakan dan minyak dan gas yang masih berada di bawah tanah. Dalam pandangan ini, eksploitasi dan penjualan minyak (dan kumpulan pendapatan minyak) adalah sebuah proses pengukuran

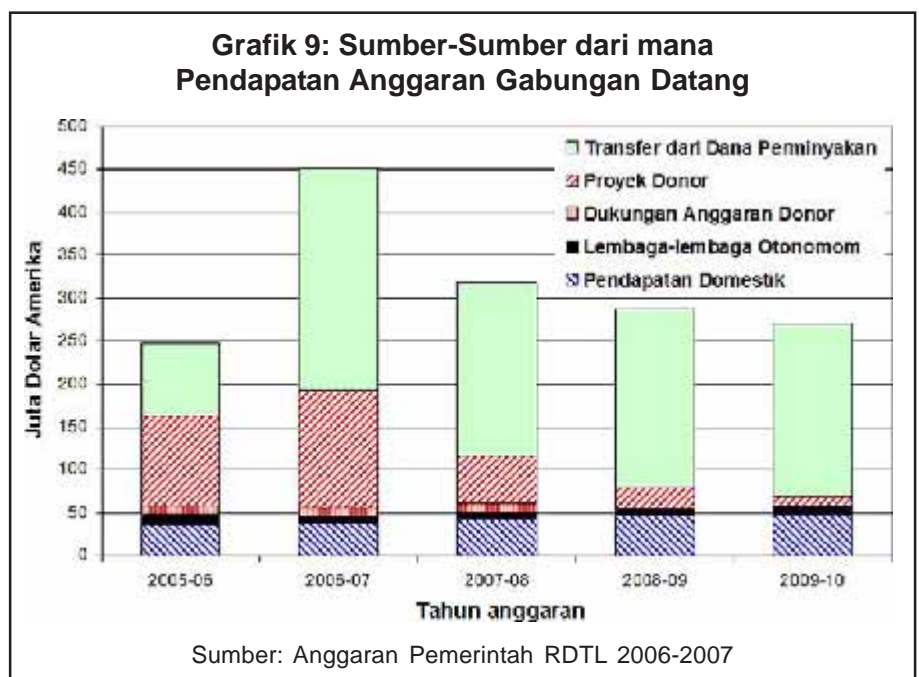
terhadap aset Timor-Leste dari satu bentuk ke bentuk yang lain, daripada penciptaan kekayaan baru.

Akan tetapi, penduduk Timor-Leste (dan kebutuhan untuk pelayanan Pemerintah) pada saat ini tumbuh 3.2% per tahun sehingga uang yang tersedia per kepala akan turun setengahnya dalam 25 tahun. Pada tahun 2050, ladang Greater Sunrise dan Bayu-Undan telah diambil semua, pendapatan berkelanjutan dari Dana Perminyakan untuk setiap warganegara dari tiga juta penduduk akan kurang dari sekarang, meskipun kalkulasi ESI sekarang belum termasuk Greater Sunrise (karena lahan ini belum memiliki rencana pembangunan). Pada tahun 2100, ini akan mencapai setengah dari level 2050, berdasarkan proyeksi penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang Dana Perminyakan, Parlemen harus mengesahkan jumlah yang ditransfer oleh Pemerintah dari Dana Perminyakan setiap tahun, sebagai bagian dari anggaran nasional. Sebelum pengesahan ini diberikan, pemerintah harus memberikan laporan kepada Parlemen yang menghitung ESI untuk tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan, yang diverifikasi oleh seorang auditor independen. Parlemen harus meminta nasihat dari Dewan Konsultasi Dana Perminyakan. Jika transfer yang direkomendasikan lebih besar daripada ESI, Pemerintah harus memberikan penjelasan yang rinci.

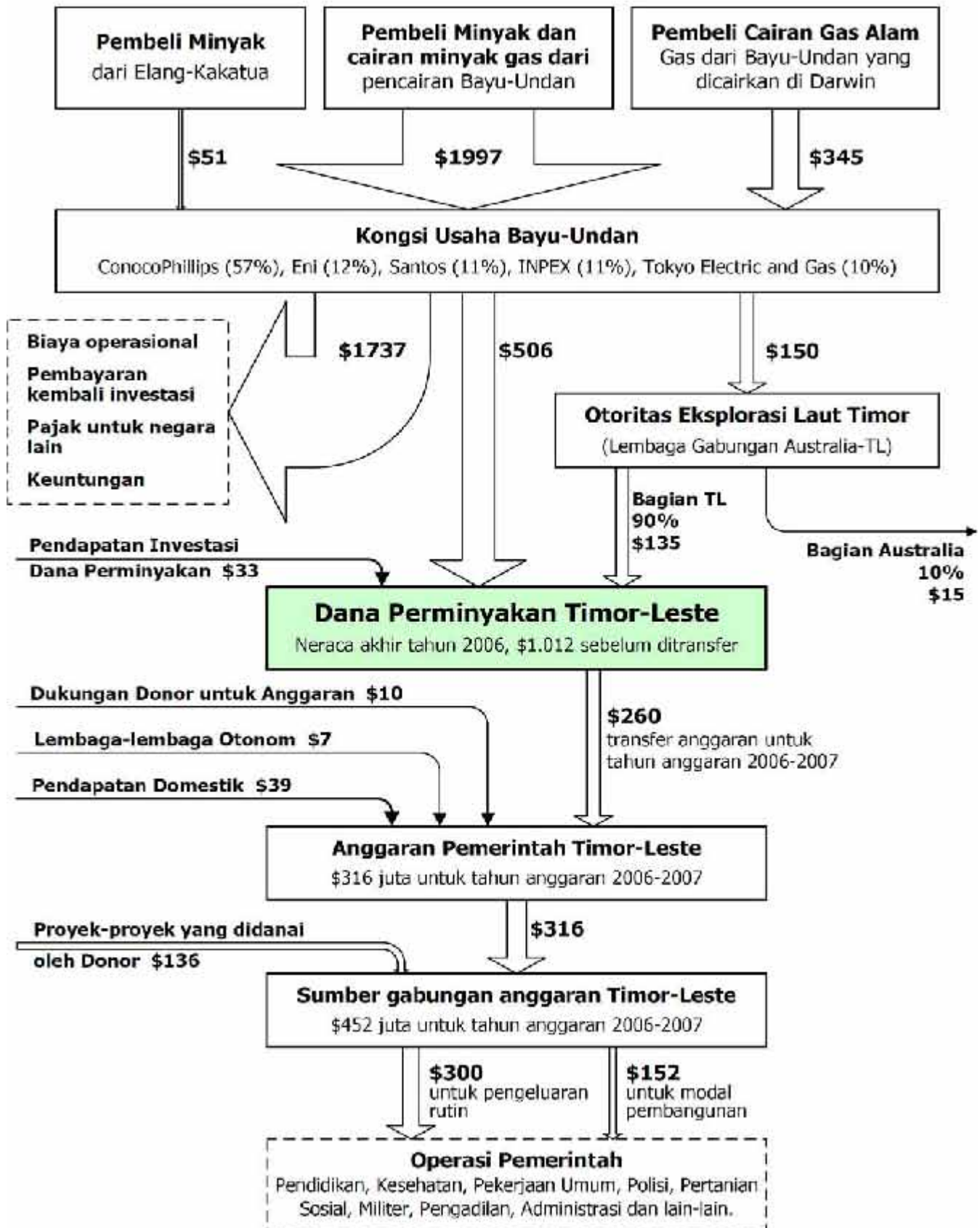
Untuk tahun anggaran sekarang, yang dimulai pada bulan Juli 2006, Pemerintah baru di bawah pimpinan José Ramos-Horta meningkatkan anggarannya untuk melaksanakan program-program pemulihan krisis. Anggaran total (tidak terhitung dengan \$136 juta dalam proyek-proyek yang dikelola donor) adalah \$315 juta, yang darinya \$260 juta akan ditransfer dari Dana Perminyakan (lihat grafik 7 dan 8).

Meskipun ini adalah tahun pertama berlakunya Undang-Undang Dana Perminyakan, proses pengesahan anggaran telah melanggar prosedur dalam Undang-Undang ini. Ini adalah akibat dari krisis yang sedang berlangsung di Timor-Leste dan khususnya Dili, karena Dewan Konsultasi Dana Perminyakan belum berfungsi, dan karena pemerintah gagal memberikan kepada Parlemen estimasi pendapatan berkelanjutan yang telah diaudit.



Grafik 8: Aliran Pendapatan dari Perminyakan Timor-Leste

Total untuk 2006. Semuanya dalam Jutaan Dolar Amerika Serikat.



Catatan: Grafik untuk operasi perminyakan dan pendapatan untuk Dana Perminyakan (angka di atas kotak Dana Perminyakan) adalah jumlah aktual untuk kalender tahun 2006. Grafik untuk pengeluaran (angka di bawah kotak Dana Perminyakan) adalah Pengalokasian anggaran (diprojektikan) untuk tahun anggaran 2006-07 yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2006.

Sumber: Laporan Triwulan Dana Perminyakan, Anggaran Pemerintah RDTL, Catatan Santos dengan Australian Stock Exchange, Data pendapatan di Website TSDA

Transparansi Sebagian

Transparansi dan pertanggungjawaban adalah mutlak bagi demokrasi. Transparansi mencakup hak warganegara untuk mendapatkan informasi mengenai Dana Perminyakan dan kegiatan-kegiatan perminyakan yang lain. Dalam mengelola pendapatan dari minyak dan gas, transparansi dan pertanggungjawaban adalah kunci karena besarnya jumlah uang akan mengundang penyalahgunaan yang bisa menyingkari rakyat Timor-Leste dari uang milik mereka, sehingga hanya menguntungkan elit lokal dan perusahaan-perusahaan minyak internasional. Undang-Undang Dana Perminyakan adalah membawa negara kita menuju pertanggungjawaban dan transparansi dalam mengelola pendapatan minyak kita.

Persoalan ini sudah dikenal dunia internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sipil global telah memulai kampanye Publish What You Pay (PWYP – Publikasikan Yang Anda Bayar) untuk menuntut agar perusahaan-perusahaan minyak membuka kepada masyarakat umum pembayaran yang mereka buat kepada pemerintah-pemerintah. Pada saat yang sama, pemerintah Inggris dan Bank Dunia memulai Extractive Industries Transparency Initiative (EITI – Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif) yang menuntut agar pemerintah-pemerintah wajib mempublikasikan apa yang mereka terima dari perusahaan-perusahaan dan mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk melakukan hal yang sama. Perdana Menteri Mari Alkatiri berpidato dalam konferensi-konferensi EITI di Eropa tahun 2003 dan 2005, dan *La'õ Hamutuk* mengirim wakil ke konferensi-konferensi tersebut pada tahun 2005 dan 2006. (Baca *Transparansi Industri Ekstraktif di Timor-Leste: Keterbatasan dalam Praktek*, *Buletin La'õ Hamutuk* Vol. 6, No. 1, April 2005.)

Meskipun Dr. Alkatiri dan Menteri Perminyakan José Teixeira berkali-kali mengungkapkan dukungan pemerintah pada prinsip-prinsip EITI, prinsip-prinsip ini belum dimasukkan dalam Undang-Undang Dana Perminyakan atau undang-undang lain RDTL. Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan minyak tidak diharuskan mempublikasikan tanggal, jumlah, dan sebab setiap pembayaran, dan laporan Dana Perminyakan dari BPA hanya mencakup daftar jumlah “penerimaan pembayaran pajak” yang diterima setiap triwulan.

Di Timor-Leste, masyarakat sipil telah bekerja keras untuk memantau dan mengadvokasikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana ini. Akan tetapi, sedemikian jauh publik di Timor-Leste hanya menerima informasi dari satu sumber, Pemerintah, karena perusahaan-perusahaan minyak tidak

diharuskan untuk membuka informasinya kepada publik dan menolak melakukannya secara sukarela. Lebih buruknya, model baru Kontrak Bagi Produksi dari pemerintah menganggap ilegal kalau suatu perusahaan membuka kepada umum informasi seperti itu tanpa meminta izin pemerintah. Pasal 15.2(e) kontrak yang baru ditandatangani dengan perusahaan Eni and Reliance mengatakan bahwa “*Kecuali ada izin dari Kementerian, atau sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang atau ketentuan-ketentuan pasar saham yang diakui, satu Kontraktor tidak boleh menjual atau membuka data, informasi, dan catatan seperti itu.*”

Laporan terpisah dari dua sumber itu sangat penting, sehingga isi laporan bisa diperiksa satu sama lain. Seperti yang diusulkan sebelumnya dan direkomendasikan EITI, Timor-Leste harus mewajibkan perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah kita untuk mempublikasikan berapa banyak yang mereka bayarkan dalam bentuk pajak, royalti, dan pembayaran-pembayaran lain kepada Pemerintah. Pemerintah perlu melaksanakan janji-janjinya kepada EITI dengan persyaratan legal, mengikuti proses yang telah dikembangkan EITI.

BPA telah mempublikasikan enam laporan triwulan mengenai Dana Perminyakan, dalam bahasa Tetun, Portugis, dan Inggris. Ini adalah bagian penting dari transparansi, meskipun laporan-laporan ini berisi informasi minimum yang diharuskan oleh hukum, dan tidak menyebutkan sumber pajaknya (pembayar pajak) Sejauh ini Pemerintah belum membuat laporan tahunan atau laporan audit mengenai Dana Perminyakan, meskipun telah beroperasi selama lebih dari satu tahun dan Dewan Konsultasi Dana Perminyakan telah meminta informasi ini.

Pemerintah dan masyarakat sipil perlu melanjutkan dan memperluas pendidikan publik mengenai pendapatan minyak di seluruh negeri, khususnya untuk penduduk pedesaan. Sejauh ini, sebagian besar informasi terbatas di Dili, sementara penduduk di distrik-distrik lain tidak punya akses pada informasi yang akurat mengenai perkembangan Dana Perminyakan. Ini menimbulkan sejumlah kecurigaan mengenai ke mana perginya uang Dana Perminyakan.

Ringkasnya, Dana Perminyakan adalah langkah penting dan mempunyai visi ke arah membantu Timor-Leste menghindari kutukan sumberdaya dan melindungi minyak dan gas kita sejak awal untuk generasi-generasi mendatang. Tetapi ini adalah satu saja dari banyak langkah yang diperlukan, dan perlu perhatian sungguh-sungguh dari pihak-pihak yang bertanggungjawab mengelolanya dan dari seluruh rakyat Timor-Leste. ❖

Daftar Istilah Dana Perminyakan

Audit: suatu pemeriksaan catatan keuangan atau analisis yang dilakukan oleh pakar (**auditor**) yang terpisah orang yang membuat catatan bersangkutan. Auditor mengeluarkan sertifikat bahwa catatan keuangan tersebut akurat, dan melaporkan kalau ada ketidakkonsistenan atau perbedaan dengan praktik-praktik akuntansi yang sudah diterima. Audit bisa dilakukan dari dalam (oleh badan yang mempersiapkan catatan keuangan) atau dari luar (oleh seseorang yang berasal dari luar badan bersangkutan). Laporan audit kebanyakan dibuka untuk umum.

Badan Penasihat Investasi (Investment Advisory Board – IAB) memberikan nasihat kepada Kementerian Perencanaan dan Keuangan mengenai kebijakan investasi untuk uang Dana Perminyakan.

Obligasi pemerintah: satu jenis investasi yang melibatkan peminjaman uang kepada suatu pemerintah. Obligasi bisa berjangka pendek bisa berjangka panjang, dan bisa berbunga tetap atau berbunga berubah-ubah sepanjang waktu sesuai dengan kekuatan pasar.

Dewan Konsultasi Dana Perminyakan: Sebuah badan penasihat yang beranggotakan para mantan pemimpin Pemerintah dan wakil-wakil berbagai sektor masyarakat. Dewan ini memberikan nasihat kepada Parlemen mengenai Dana Perminyakan sebelum Parlemen membuat keputusan apa saja mengenai pengambilan uang dari Dana Perminyakan.

Federal Reserve Bank di New York adalah bagian dari sistem Cadangan Federal yang merupakan bank sentral Amerika Serikat. Dana Perminyakan Timor-Leste disimpan di bank ini, yang sama dengan meminjamkan uang tersebut kepada Pemerintah Amerika Serikat.

Investasi: Investasi finansial adalah meminjamkan uang kepada suatu pemerintah atau perusahaan (seperti menyimpan dalam satu bank atau membeli saham atau obligasi), untuk mendapatkan pendapatan atas investasi (bunga atau dividen). Untuk sebagian investasi, nilai uang pokok (jumlah yang diinvestasikan) juga meningkat atau menurun sepanjang waktu. Juga dimungkinkan untuk menginvestasikan dalam modal manusia atau fisik suatu negara, seperti melalui pendidikan, pelayanan kesehatan preventif atau infrastruktur, tetapi Dana Perminyakan Timor-Leste terbatas pada investasi finansial.

Modal Pokok: Sejumlah uang yang digunakan untuk investasi dan bunganya dibayar.

Otoritas Mengenai Laut Timor (Timor Sea Designated Authority – TSDA): Satu badan pemerintah dua negara Australia/Timor-Leste dibentuk berdasarkan Perjanjian Laut Timor 2002 untuk mengatur proyek-proyek perminyakan di dalam **Wilayah Pengembangan Perminyakan Bersama (Joint Petroleum Develop-**

ment Area – JPDA) di Laut Timor, termasuk ladang minyak dan gas **Bayu-Undan** (berproduksi sejak 2004), bagian dari ladang yang lebih besar **Greater Sunrise** (yang bisa mulai produksi dalam waktu sekitar lima tahun), dan ladang minyak Elang-Kakatua yang lebih kecil (berproduksi sejak 1998, hampir habis). TSDA dua per tiga dikontrol oleh Timor-Leste dan bertindak seperti pemerintah untuk keperluan mengontrak dengan dan mengelola operasi perusahaan minyak dalam JPDA.

Otoritas Perbankan dan Pembayaran (OPP/BPA – Banking and Payments Authority) adalah Bank Sentral Timor-Leste, satu badan pemerintah semi-independen yang bertanggungjawab mengelola aset Pemerintah dan mengatur sektor perbankan. BPA juga mengelola investasi dan operasi Dana Perminyakan, melaporkan kegiatan-kegiatannya.

Estimasi Pendapatan Berkelanjutan (Estimated Sustainable Income – ESI): Satu proyeksi mengenai jumlah maksimum uang yang bisa diambil dari Dana Perminyakan setiap tahun untuk waktu yang tidak terbatas (yaitu, **berkelanjutan**). ESI diperhitungkan dengan menambahkan nilai total Dana Perminyakan dan cadangan minyak dan gas yang masih ada di dalam tanah (yang dihitung hanya yang rencana pengembangannya telah disetujui), dan memperkirakan berapa bunga yang akan diperoleh dengan menginvestasikan jumlah tersebut.

Perminyakan (petroleum) adalah hidrokarbon cair atau gas yang ditemukan di dalam tanah. Dalam tulisan ini, kami menggunakan “minyak” dan “perminyakan” untuk meliputi minyak mentah, gas alam, dan substansi yang bisa dipasarkan lainnya yang ditemukan bersamanya.

Rekening Dana Perminyakan: Sebuah rekening dalam Federal Reserve Bank di New York yang dibuka pada 9 September 2005, dengan transfer dari Rekening Celah Timor. Perusahaan-perusahaan minyak dan lainnya bertanggungjawab untuk membayar ke Dana Perminyakan menjadi deposito langsung dalam rekening ini.

Sumberdaya Tak Bisa Diperbaharui: Satu sumberdaya alam, seperti minyak, yang tidak bisa digantikan karena digunakan dan akhirnya akan habis. Ini berbeda dengan sumberdaya alam yang bisa diperbaharui, seperti air atau ikan, yang bisa memulihkan dirinya sendiri.

Tahun Anggaran: Sebuah periode 12 bulan yang digunakan untuk anggaran dan pengelolaan keuangan, dimana boleh sama atau tidak sama seperti kalender tahunan. Tahun anggaran pemerintah dimulai dari 1 Juli sampai 30 Juni.

Undang-Undang Dana Perminyakan: Undang-undang yang mengatur bagaimana pemerintah mengelola penghasilan terkait perminyakan menggunakan Dana Perminyakan.

Timor-Leste dan Dana Perminyakan Norwegia

Pejabat pemerintah dan Bank Dunia mengklaim bahwa Dana Perminyakan kita merupakan salah satu yang terbaik di dunia, didasarkan pada model Norwegia. Mereka menyebutnya “Norwegia Plus.” Box ini membuat ringkasan beberapa kesamaan dan perbedaan antara Dana Perminyakan Timor-Leste dan Norwegia.

	Dana Perminyakan Timor-Leste	Dana Pemerintah Pensiun Norwegia (Dulunya dikenal dengan Dana Perminyakan Pemerintah)
Transparansi	Timor-Leste mengharuskan Bank Sentral untuk melaporkan operasi Dana Perminyakan setiap triwulan, ditambah dengan laporan tahunan kepada kementerian keuangan dan publik. Timor-Leste juga mengharuskan kementerian keuangan untuk mempublikasikan laporan audit.	Norwegian mempublikasikan audit Dana Perminyakan setiap triwulan. Laporan ini dipersiapkan oleh Bank Norwegia dan “Disertifikasi oleh Bank Audit Sentral.”
Deposito	Semua pendapatan perminyakan Pemerintah langsung didepositokan dalam Dana Perminyakan oleh perusahaan perminyakan dan Otoritas mengenai Laut Timor.	Sebagian pendapatan langsung didepositokan untuk Dana Perminyakan, tetapi sebagian besar dibayarkan secara langsung ke rekening Pemerintah dan surplusnya (setelah digunakan untuk menutupi defisit anggaran) ditransfer untuk Dana Perminyakan dari Pemerintah.
Pedoman Etis untuk Investasi	Timor-Leste tidak memiliki Pedoman Etis. Hingga hari ini, semua uang sudah diinvestasikan di Federal Reserve Bank, Amerika Serikat.	Pedoman Etis melarang untuk menginvestasikan uang dari Dana Perminyakan ke perusahaan yang memproduksi senjata nuklir, ranjau darat, senjata yang mengancam kehidupan orang, atau perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup. Pedoman ini menghindari dana ini dari investasi ke dalam perusahaan minyak yang secara ilegal mengokupasi sahara barat, meskipun dana ini juga masih melanjutkan investasinya terhadap perusahaan yang beroperasi di Burma.
Dewan Konsultasi Dana Perminyakan	Dewan Konsultasi Dana Perminyakan memberi nasihat kepada Parlemen nasional tentang transfer dari Dana Perminyakan. Dewan ini terdiri dari orang-orang terkenal dan wakil dari dari berbagai sektor masyarakat.	Norwegia tidak memiliki Dewan Konsultasi, meskipun Norwegia lebih bertanggung jawab terhadap warganegara daripada Timor-Leste, sehingga, ada banyak cara agar orang-orang yang memiliki kemampuan memberikan masukan untuk bagaimana pembelanjaan dana itu.
Penasihat Investasi	Badan Penasihat Investasi menasehati kementerian keuangan dalam merancang strategi investasi.	Dewan Strategi Investasi memiliki kesamaan dengan Badan Penasihat Investasi.
Keputusan untuk mengambil uang	Timor-Leste tidak memerlukan resolusi khusus dari Parlemen untuk mengambil uang dari Dana Perminyakan. Pengambilan disetujui secara otomatis ketika anggaran pemerintah disetujui.	Parlemen harus mensahkan sebuah resolusi khusus untuk setiap pengambilan uang dari Dana Perminyakan. Meskipun sejumlah pendapatan minyak didepositokan secara langsung dalam rekening pemerintah dan dapat digunakan sebelum surplusnya ditransfer ke Dana.
Jumlah yang diambil	Timor-Leste mentransfer uang dari Dana Perminyakan ke anggaran pemerintah setiap tahun untuk menutup defisit rencana pengeluaran dan pendapatan non-migas. Jika jumlahnya lebih besar dari Estimasi Pendapatan Berkelanjutan Dana Perminyakan, perlu mengikuti informasi dan prosedur tambahan.	Norwegia juga menggunakan uang dari Dana Perminyakan untuk mengisi defisit anggaran tahunan pemerintah. Pedoman kebijakan anggaran mengatakan bahwa dividen nyata yang diharapkan sesudah inflasi tidak lebih dari (4%) dari investasi Dana Perminyakan harus dibelanjakan dalam tahun yang diterima. Ini lebih rendah dari 3% Estimasi pendapatan berkelanjutan Timor-Leste.
Pemikiran dasar untuk Dana	Dana Perminyakan Timor-Leste memperbolehkan uang yang diperoleh dari penjualan minyak dan gas digunakan untuk mendanai pelayanan pemerintah untuk generasi sekarang dan generasi masa depan, Penghasilan uang dalam jumlah yang sama setiap tahun, bahkan setelah minyak telah habis. Penduduk Timor-Leste kebanyakan berusia muda dan pertumbuhannya pesat.	Seperti halnya Timor-Leste, Norwegia menerima pendapatan dari minyak lebih cepat daripada penggunaan secara bermanfaat. Tetapi penduduk Norwegia stabil dan lama hidup. Pemerintah memiliki niat untuk menggunakan dana untuk membayar biaya pensiunan bagi orang yang sudah tua, setelah meninggalkan pekerjaan mereka, sebuah pengeluaran yang akan berlipat tiga kali peningkatannya pada 35 tahun mendatang, ketika produksi perminyakan menurun. Dengan Tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah dan harapan hidup yang tinggi, berarti bahwa lebih sedikit pekerja yang akan dibayar dengan dana pensiun untuk mencakup meningkatnya jumlah penduduk yang pension.
Sejarah	Timor-Leste memulai pembangunan perminyakan ketika Negara ini baru merestorasikan kemerdekaannya, institusi-institusi publik dan para pejabat masih kurang pengalaman, lemahnya demokrasi dan penguatan hukum dan pembangunan non migas masih sangat terbatas. Ini menyebabkan ekonomi Timor-Leste menjadi sangat tergantung terhadap minyak dan 90% dari anggaran pemerintah juga sangat tergantung terhadap minyak.	Norwegia memulai pembangunan perminyakannya setelah kedamaian, demokrasi dan hukum sudah dibangun secara baik selama beberapa dekade, dan juga diversifikasi ekonomi serta institusi-institusi Negara sudah kuat. Meskipun Pendapatan perminyakan Norwegia lebih besar dari pendapatan Timor-Leste, hanya 10% dari anggaran Pemerintah yang dibayar oleh pendapatan perminyakan.

Perbandingan Timor-Leste dan Norwegia

(Jumlah dalam mata uang Dolar Amerika)

	Timor-Leste	Norwegia
Penduduk pada saat ini (2006)	1,1 juta	4,6 juta
Estimasi penduduk pada tahun 2050	3,0 juta	5,4 juta
Pembagian penduduk umur dibawah 15 tahun (2004)	43%	20%
Rata-rata harapan hidup untuk penduduk yang lahir pada tahun 2004	59 tahun	80 tahun
Lamanya kedamaian dan pemerintahan sendiri yang demokratis	4	102 (Kecuali penduduk Nazi 1940-1945)
Produk Domestik Bruto (PDB/GDP)	\$370 juta	\$207.000 juta
GDP per penduduk	\$340	\$45.000
Ranking Berdasarkan Index Pembangunan Manusia, Program Pembangunan PBB (UNDP) (2006)	142 dari 177 negara	1 dari 177 negara
Data di bawah ini diproyeksikan untuk anggaran tahunan, tahun ini	Tahun anggaran 2006-2007	Kalendar tahun 2007
Perkiraan pendapatan Perminyakan yang diharapkan selama tahun ini (bersih)	\$644 juta	\$59.600 juta
Prosentasi GDP dari Perminyakan	63%	22%
Pendapatan pemerintah non-migas (Termasuk dukungan anggaran pemerintah dari donor)	\$56 juta	\$104.000 juta
Pengeluaran Pemerintah (Tidak termasuk Proyek-proyek yang dikelola oleh donor)	\$316 juta	\$113.000 juta
Uang perminyakan yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah	\$260 juta	\$9.300 juta
Persentase anggaran pemerintah yang dibayar dengan uang dari dana	82%	8%
Pendapatan perminyakan yang didepositokan dalam Dana Perminyakan	\$384 juta	\$50.300 juta
Bunga yang diperoleh dari investasi Dana Perminyakan (didepositokan kembali)	\$40 juta	\$12.900 juta
Pertumbuhan Dana Perminyakan selama setahun.	\$424 juta	\$63.200 juta
Neraca Dana Perminyakan pada akhir tahun	\$1074 juta	\$418.000 juta

Sumber: Prospek Penduduk Dunia (2004), CIA World Fact Book, RDTL Budget, Tahun anggaran 2006-2007, anggaran Norwegia, 2007, Laporan Index Pembangunan Manusia UN World Population Prospects (2004), CIA World Factbook, RDTL Budget FY 2006-2007, (2006), Laporan Triwulan Dana Perminyakan Timor-Leste, Proyeksi Sensus Penduduk Timor-Leste (2004).

Kembalikan Kekayaan Alam Kami

Pada bulan Oktober 2006 Santina Soares staff *La'o Hamutuk* menghadiri pertemuan Forum Oilwatch di Coca, Ekuador. Pertemuan ini diorganisir oleh Sekretariat Oilwatch di Ekuador dan dihadiri oleh 22 negara yang datang dari negara-negara kaya akan sumber daya alam dan dari berbagai benua juga masyarakat pribumi Ekuador. Oilwatch adalah jaringan internasional yang didirikan pada tahun 1996 di Quito, Ekuador, sebagai jaringan kelompok yang berasal dari negara-negara yang berhutan tropis untuk melawan aktifitas industri minyak, berjuang melawan kerakusan dari hegemoni minyak, menentang keterbelakangan yang bukan kepalang di tengah-tengah mereka yang berkecukupan, melawan kerusakan lingkungan dan degradasi sosial, sebagai hasil dari kerakusan manusia, perusahaan dan individu-individu yang mengeksploitasi kekayaan dan sumberdaya alam masyarakat.

Aktivitas-aktivitas dari Oilwatch tahun 2006 diawali dengan kegiatan "Toxic Tour" (Wisata Beracun) untuk mengunjungi dan mengetahui tentang dampak negatif dari eksploitasi minyak dan gas di daerah-daerah yang ada industri minyak. Toxic Tour ini dimulai dari Lago Agrio di hutan Amazon, dimana menjadi salah satu wilayah eksploitasi minyak di Ekuador.

Setelah kegiatan Toxic Tour, peserta mengadakan tiga hari konferensi di Coca untuk membahas isu-isu mengenai eksploitasi minyak di negara-negara tropis dan mendengarkan kesaksian dari masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dari dampak sosial, ekonomi, kerugian lingkungan dan dampak operasi minyak terhadap hak asasi manusia. Dalam konferensi ini masyarakat pribumi Ekuador juga menjelaskan protes mereka terhadap perusahaan-perusahaan minyak; pemerintah yang seringkali bekerja sama dengan perusahaan dan merespon dengan banyak kekerasan. Ketika kami tiba di Coca, kami mengawali dengan pawai menuju ke kota, saya mendengar masyarakat pribumi Ekuador dan aktifis lain mengatakan bahwa "kembalikan kekayaan alam kami." Mereka protes karena mereka percaya bahwa minyak tidak memperbaiki kehidupan mereka, oleh karena itu mereka ingin menghentikan aktifitas industri minyak. Di konferensi ini wakil *La'o Hamutuk* juga membagikan informasi mengenai perkembangan dari pengembangan minyak di Timor-Leste.



Adapun isu-isu penting yang dibahas dalam konferensi dan tetap menjadi isu strategis dalam pergerakan global jaringan Oilwatch di setiap negara dan juga sekretariat internasional Oilwatch.

Dampak negatif dari pembangunan minyak terhadap ekonomi, social, lingkungan dan hak asasi manusia

Ekuador adalah salah satu negara yang kaya akan sumberdaya alam. Disekitar wilayah Amazonia masih banyak sekali hutan dan juga merupakan daerah yang dilindungi. Sejak tahun 1970-an perusahaan minyak sudah mulai mengambil minyak lebih dari 2 milyar barrel dari minyak mentah yang ada di daerah Ekuador Amazonia. Perusahaan Texaco (sekarang ChevronTexaco) telah menjadi perusahaan utama di sini. Ketika mereka menarik diri beberapa tahun yang lalu dan mentransfer operasi mereka kepada perusahaan negara PetroEcuador, mereka meninggalkan kerusakan lingkungan, dan masyarakat lokal dan para aktifis terus menuntut agar mereka memperbaiki dan membersihkan barang-barang yang kotor dan berantakan dimana-mana.

Selama Toxic Tour sehari yang dipelajari adalah, sumber daya alam tidak selalu membawa kekayaan kepada masyarakat dan negara seperti yang dijanjikan. Di sekitar daerah operasi minyak, fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur masih sangat tertinggal, dan ada kerugian yang sangat jelas dari teknologi dan praktek buruk seperti gas yang terbakar di udara, polusi, pencemaran, dan alat-alat dan fasilitas yang dibiarkan. Tidak adanya tim evaluasi yang independen dan sering memberikan hasil yang penuh manipulasi. Perbaikan dari kerusakan lingkungan hidup sangat tidak mencukupi.

Lingkungan, udara dan ekosistem lain di daerah sekitar aktivitas eksploitasi minyak banyak yang telah dirusak, dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya meminta kepada perusahaan untuk membersihkan air yang telah dicemari oleh minyak dan gas yang dibuang di sembarang tempat. Dalam tiga hari konferensi di Coca yang banyak kesaksian dari masyarakat yang mengalami dampak dari aktifitas minyak. Misalnya, Marina dari Susufindi, adalah perempuan yang bekerja dengan masyarakat pribumi, mengatakan bahwa "Kami mengalami kesulitan banyak dengan perusahaan minyak, air yang tercemar tetapi diminum oleh masyarakat dan menjadi sakit, banyak binatang peliharaan kami juga mati. Kemudian kami meminta perusahaan untuk memperbaikinya, tetapi perusahaan berbohong mengenai akibat dari pencemaran racun. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena kami takut kepada perusahaan minyak."

Ini adalah sebuah kenyataan yang banyak dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, karena pembangunan ekonomi masih sangat miskin, namun mereka menderita karena kekayaan mereka.

Masyarakat yang tinggal di sekitar aktivitas produksi minyak masih sangat jauh tertinggal secara pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Juga mengalami banyak sekali penderitaan hak mereka tidak didengarkan oleh perusahaan dan bahkan oleh pemerintah.

Masyarakat Pribumi

Masyarakat pribumi sering dimarginalisasikan dari aktifitas pembangunan. Seringkali sangat sulit bagi mereka untuk dipindahkan ke tempat yang baru, adaptasi dan supaya bisa bertahan di tempat yang baru. Walaupun demikian mereka harus meninggalkan tempat mereka karena pemerintah dan perusahaan telah menandatangani kontrak untuk eksploitasi minyak dan gas tanpa konsultasi dengan masyarakat lokal. Meskipun ada konsultasi tetapi tidak bersifat komunikasi dua arah. Kompensasi sering tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak dapat menuntut hak mereka karena kurangnya pengetahuan dan informasi.

Militarisasi

Militarisasi adalah alat yang sering digunakan oleh perusahaan untuk memberikan keamanan di sekitar fasilitas minyak, biasanya pemerintah bekerjasama dengan perusahaan untuk melindungi perusahaan, bukan masyarakat. Keterlibatan militer sering dibenarkan sebagai jaminan keamanan. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam seperti Ekuador dan di Negara Amerika Latin mana pun, Indonesia, Malaysia telah memiliki pengalaman dengan militarisasi. Banyak orang yang telah dibunuh ketika mereka marah kepada perusahaan atau ketika mereka menuntut tanggungjawab dari perusahaan terhadap kecelakaan apa saja yang dilakukan oleh mereka. Peserta Oilwatch mengalami itu ketika salah satu kelompok dari kami yang mendayung sepeda dan bertengkar ketika bertemu dengan militer. Karena militer membuat pengunjung harus melewati proses investigasi dan penyelidikan yang panjang sebelum masuk ke Lago Agrio, kelompok lain yang terbang ke airport Lago Agrio juga mendapati militer yang memberikan penjagaan. Ketika kami mengunjungi tempat minyak di Amazonia, dekat perbatasan dengan Colombia, di sana juga penjagaan militer sangat ketat.

Reparasi Integral

Reparasi lingkungan adalah topik penting yang didiskusikan oleh peserta dari Oilwatch. Khususnya, reparasi lingkungan adalah sangat penting bagi masyarakat yang langsung



mengalami dampak eksploitasi minyak dan gas. Kami menyetujui bahwa reparasi lingkungan semestinya diharuskan di dalam kontrak, dan kami telah menulis surat legal yang bisa digunakan. Seharusnya ada mekanisme dari kompensasi kepada mereka yang menderita kerugian dari lingkungan mereka, kesehatan, air, polusi, pembuangan sampah, dan menfungsikan kembali tanah yang telah dipakai. Dari pengalaman beberapa orang, eksploitasi minyak sudah selesai, tetapi masyarakat tidak dapat menggunakan tanah dan air mereka, dan perusahaan meninggalkan saja gas yang terbakar di udara bebas.

Energi Alternatif

Energi alternatif sangat penting, karena dengan begitu kita tidak perlu tergantung terhadap minyak dan gas, tetapi juga dapat mengurangi risiko. Energi alternatif dipromosikan oleh salah satu anggota Oilwatch yang berbasis di Thailand, yaitu Campaign for Alternative Industry Network (CAIN).

Apa yang bisa dipelajari oleh Timor-Leste dari anggota Oilwatch lain?

Timor-Leste adalah negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya, oleh karenanya kita perlu banyak belajar dari pengalaman negara-negara lain, supaya kita bisa membuat kebijakan politik yang bijaksana untuk menguntungkan rakyat Timor-Leste. Pengalaman ini juga dapat mengajari kita bagaimana menghindari beberapa dampak negatif. Meskipun kita belum memiliki pengalaman yang buruk dari aktifitas eksploitasi minyak karena proyek-proyek yang ada jauh di laut sana yakni Wilayah Pengembangan Perminyak di Bersama (JPDA), kita harus sangat hati-hati dengan area lain di dalam daerah eksklusifnya Timor-Leste yang tidak lama lagi akan dieksploitasi karena di bawah kontrak antara pemerintah dan perusahaan. Bahkan di masa datang, aktifitas industri minyak di daratan akan lebih berbahaya.

Masyarakat sipil Timor-Leste harus lebih proaktif dan terus mengorganisasi diri dan memberikan keberanian kepada pemerintah untuk mengatur sumber daya alam kita secara tepat dan baik untuk menguntungkan semua orang Timor-Leste. Kekuatan dari gerakan masyarakat lokal dari negara lain sangat bernilai sebagai referensi untuk masa depan kita. ❖

Pertemuan Publik mengenai Perjanjian CMATS

Pada 18 Januari 2007, *La' o Hamutuk* mengadakan sebuah diskusi publik mengenai Perjanjian CMATS yang dibuat oleh Pemerintah Timor-Leste dan Pemerintah Australia. Para pembicara dalam diskusi publik ini adalah José Teixeira (Menteri Sumber Daya Alam), Elizário Ferreira (Parlemen Nasional, Partai Fretilin), Francisco Monteiro (Penasihat Presiden untuk Sumber Daya Alam) dan Santina Soares (*La' o Hamutuk*).

Dalam presentasinya, José Teixeira menyoroti beberapa poin penting dari perjanjian itu sekaligus alasan-alasan tertentu atau pertimbangan-pertimbangan di balik perjanjian tersebut. Santina Soares merespon bahwa kesepakatan tersebut lebih memberi manfaat bagi pihak Pemerintah Australia dan perusahaan-perusahaan minyak daripada Timor-Leste. Monteiro juga berpendapat bahwa ada bagian-bagian tertentu dari perjanjian sangat buruk bagi Timor-Leste. Salah satu kelemahan dari perjanjian ini adalah tidak ada sama sekali poin mengenai perbatasan laut antara kedua negara. Pada akhir diskusi, Santina Soares dan Francisco Monteiro mendesak Parlemen Nasional untuk secara berhati-hati meninjau kembali perjanjian tersebut sebelum mereka meratifikasinya.

Pertemuan itu dihadiri 53 orang dari organisasi non-pemerintah lokal, mahasiswa dan akademisi, anggota Parlemen, media lokal, staf TSDA, dan para diplomat. Sangat jelas kebanyakan masyarakat tidak memiliki informasi yang jelas mengenai Perjanjian CMATS.

Sejak minyak dan gas di Laut Timor menjadi isu nasional, *La' o Hamutuk* mengusulkan agar setiap bagian masyarakat Timor-Leste harus mendapatkan informasi mengenai isu-isu minyak dan gas di Laut Timor dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam proses-proses negosiasi dan pembuatan perundang-undangan oleh Pemerintah Timor-Leste dan Australia. *La' o Hamutuk* percaya bahwa sebelum perjanjian disetujui oleh Parlemen Timor-Leste, Pemerintah dan Parlemen harus melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat negara ini, untuk meminta ide mereka mengenai perjanjian tersebut.

Pada 14 Februari, *La' o Hamutuk* menulis surat terbuka kepada Parlemen Nasional Timor-Leste, mendesak mereka untuk mempelajari Perjanjian CMATS dengan hati-hati sebelum menandatangani, dan merekomendasikan kepada Parlemen untuk meminta kepada Perdana Menteri untuk merundingkan kembali bagian-bagian tertentu dari perjanjian ini dengan Australia. Minggu berikutnya, Parlemen meratifikasi Perjanjian tersebut setelah melalui diskusi yang terbatas, dengan 48 suara setuju. Pada 23 Februari, Pemerintah Timor-Leste dan Australia secara resmi serah terima nota untuk meletakkan Perjanjian CMATS dan diimplementasikannya Penyatuan Internasional Sunrise meskipun Parlemen Australia masih tetap mempertanyakan perjanjian tersebut. ❖



Dari kiri ke kanan: Francisco da Costa Monteiro, José Teixeira, Santina Soares, Guteriano Neves (moderator).

Pertemuan Publik mengenai Kerja Sama PNTL-UNPOL

Pada 19 Desember 2006, *La' o Hamutuk* mengadakan diskusi terbuka mengenai kerjasama antara UNMIT dan Pemerintah Timor-Leste dalam hubungannya dengan rekonstruksi PNTL. Diskusi tersebut diadakan di Auditorium UNTL, dengan pembicara yang terdiri dari Allison Cooper dan Donna Cusumano (keduanya dari UNMIT), José Agostinho Siqueira (Wakil Menteri Dalam Negeri) dan José António, anggota Tim Teknis yang terlibat dalam proses penyaringan PNTL.

Tujuan dari diskusi publik adalah untuk mendengarkan secara langsung dari mereka yang terlibat dalam kerja sama antara UNMIT dan Pemerintah mengenai proses penilaian dan rencana pengaktifan kembali PNTL.

Sayangnya diskusi publik ini tidak dapat menggali informasi yang diperlukan mengenai kerjasama yang ditandatangani oleh UNMIT dan Pemerintah pada tanggal 1 Desember 2006,

karena dokumen tersebut sedang diterjemahkan. Lebih jauh, informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak terlalu umum.

Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para partisipan tidak mendapat jawaban karena sedikitnya waktu yang dimiliki oleh para pembicara. Dalam diskusi ini, *chefe aldeia* Surik Mas menyampaikan beberapa usulan mengenai keprihatinannya terhadap keamanan di lingkungannya, termasuk segera diaktifkannya kembali PNTL, dengan kerja sama PNTL dan UNPOL untuk memulihkan dan menjaga keamanan, penegakan hukum dan peraturan di ibukota Dili.

La' o Hamutuk berpendapat bahwa diskusi-diskusi seperti ini sangatlah penting bagi masyarakat sipil Timor-Leste, dan kami berharap UNMIT dan para pejabat pemerintah lebih menerima kebutuhan publik untuk mendapatkan informasi yang tepat. ❖



Dari kiri ke kanan: Allison Cooper, Donna Cusumano, interpreter, José Agostinho Siqueira, José António, Justino da Silva (Moderator)

Dengarkan Program Radio “I igualidade” La’o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu penting yang kami pantau!

Setiap Minggu pada jam 1:00 siang di Radio Timor-Leste

Pelajaran dari Timor-Leste untuk PBB

Pada 13 Juni 2006, Sekretaris Jendrel Kofi Annan berpidato di depan Dewan Keamanan di New York

“Kekerasan dan kerusakan yang dialami oleh Timor-Leste dalam beberapa minggu terakhir ini sangatlah menyakitkan karena dalam beberapa hal Timor-Leste merupakan anak dari masyarakat internasional. Melalui empat misinya berturut-turut...PBB memainkan sebuah peran kunci dalam meletakkan fondasi bagi proses-proses dan lembaga-lembaga demokratis di Timor-Leste. Saat ini, lembaga-lembaga dan proses-proses tersebut tidak terlindungi. Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dalam beberapa minggu terakhir merefleksikan kelemahan-kelemahan yang bukan hanya kelemahan dari kepemimpinan Timor-Leste, tetapi juga masyarakat internasional yang secara tidak tepat menyokong proses pembangunan bangsa Timor-Leste. Kita telah belajar, harga yang sangat menyakitkan bagi Timor-Leste, bahwa membangun lembaga-lembaga...bukanlah proses yang mudah yang bisa diselesaikan dalam beberapa tahun saja. Jelasnya, kerja-kerja yang hebat masih terus berlangsung, baik bagi Pemerintah Timor-Leste dan masyarakat internasional, tetapi, seperti yang saya sampaikan melalui video pada tanggal 1 Juni, PBB ditentukan bukan untuk meninggalkan masyarakat Timor-Leste pada saat kritis.”

La'o Hamutuk, bersama dengan yang lain di Timor-Leste, telah memantau kegiatan-kegiatan Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) di Timor-Leste sejak tahun 2000. Lebih dari tujuh tahun, kami telah mengidentifikasi banyak masalah dengan misi UNTAET, UNMISSET dan UNOTIL dan telah membuat banyak rekomendasi. Untuk melakukan misi berikutnya dengan lebih baik, kami mengajukan sebuah memo kepada staf PBB dan Dewan Keamanan mengenai pelajaran-pelajaran yang telah kita dapat dari pengalaman PBB di Timor-Leste, pada bulan Juni 2006.

UNMIT telah menyelesaikan enam bulan pertamanya di Timor-Leste, dan hanya diperpanjang oleh Dewan Keamanan hingga Februari 2008. Akan tetapi, rekomendasi-rekomendasi *La'o Hamutuk* masih berlaku dan cocok, dan kami ingin membagikan rekomendasi-rekomendasi tersebut dengan para pembaca *Buletin*.

Kedaulatan dan rasa hormat

Banyak diplomat menunjuk Timor-Leste sebagai seorang “anak” dari masyarakat internasional. Meskipun kami setuju bahwa masyarakat internasional harus terus membantu pembangunan Timor-Leste sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa, kami tidak setuju dengan hakikat bapakisme dari kiasan orang tua-anak. Sebagai tambahan untuk mengakui kedaulatan pemerintah Timor-Leste, masyarakat internasional harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat Timor-Leste.

Kami bermasalah terutama dengan keinginan Australia untuk mendapatkan status istimewa dalam keterlibatan masyarakat internasional di Timor-Leste. Pemerintah Australia berulang-ulang menunjukkan kurangnya rasa hormat mereka kepada hak berdaulat Timor-Leste dan penegakan hukum selama negosiasi minyak dan cadangan gas di Laut Timor. Lebih belakangan, Australia mengirim para tentara terlatih yang tidak tepat dan enggan berkoordinasi dengan badan-badan internasional yang lain dalam operasi-operasi keamanannya, menekankan bahwa badan-badan internasional yang lain di bawah komando langsung Australia. PBB seharusnya tidak menerima keterlibatan Australia atau bangsa-bangsa lain kecuali sebagai mitra kerja penuh dalam pasukan PBB, di bawah komando PBB.

Pada bulan Juni, Presiden Xanana Gusmão, Lu Olo, dan Perdana Menteri Mari Alkatiri menulis surat kepada

Sekretaris Jendrel PBB, bahwa “polisi PBB yang tegas, militer dan misi sipil sangat diperlukan untuk membantu masyarakat Timor-Leste mengkonsolidasikan perdamaian dan kebebasan yang telah kami menangkan dengan kerja keras.”

Pada 4 Agustus, Perdana Menteri Ramos-Horta menulis surat kepada Dewan Keamanan bahwa “dengan seluruh komponen masyarakat sipil yang kuat, misi baru seharusnya mempunyai pasukan kepolisian yang kekuatannya dipertimbangkan untuk memungkinkan penempatannya di seluruh distrik dan sub-distrik, didukung oleh angkatan bersenjata dalam jumlah kecil, di bawah komando dan kontrol PBB.” Sekretaris Jendrel PBB, Malaysia, Portugal dan yang lain setuju, juga Parlemen dan organisasi masyarakat sipil Timor-Leste. Tetapi setelah tiga minggu kemudian, Australia dan Jepang menekan pemerintah untuk mengubah pendiriannya dan memberikan komando pasukan internasional di Timor-Leste kepada Australia. Pada saat UNMIT didirikan pada tanggal 25 Agustus dimana Australia masih menjadi bagian dari komponen militer, struktur Dewan dipertegas dua bulan kemudian.

PBB dan para pemerintah asing dan lembaga-lembaga yang lain di Timor-Leste harus bekerja lebih baik. Mereka harus menghormati keputusan-keputusan Pemerintah Timor-Leste yang berdaulat, dan berkoordinasi dengan Pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat Timor-Leste di tingkat nasional dan distrik.

Sampai mencapai tujuan

Banyak yang setuju bahwa penarikan diri lebih awal PBB dari Timor-Leste pada 2004, dan memahami bahwa pembangunan sebuah bangsa memerlukan waktu, dan tidak bisa dipercepat untuk memenuhi prioritas keuangan atau politik para anggota Dewan Keamanan. Selama PBB mempersiapkan diri untuk menangani kembali Timor-Leste, kualitas juga lamanya waktu kehadiran masyarakat internasional harus dievaluasi dan diperbaiki. Jika misi UNTAET dan UNMISSET telah berakhir dua kali tetapi menggunakan metode, staf dan prioritas yang sama, Timor-Leste mungkin bisa berkembang ke krisis yang sama dengan krisis sekarang ini.

Lebih dari enam tahun, lembaga-lembaga internasional telah belajar banyak mengenai pembangunan suatu bangsa. Timor-Leste sebagai pemerintahan transisi PBB yang berdaulat pertama kali telah mengalami banyak percobaan dan kesalahan. Rakyat kita menderita dari proses belajar yang

diharapkan akan bermanfaat bagi warga negara bangsa-bangsa baru. Keduanya, rakyat Timor-Leste dan masyarakat internasional bisa mendapatkan sedikit kepuasan yang sekarang ini bisa menjadi kesempatan kedua. Kami berharap pelajaran yang didapat sejak 1999 saat ini akan dijalankan di Timor-Leste – tetapi kita lebih mendesak PBB untuk berpikir di luar kebijakan-kebijakan mereka semata untuk mencegah kesalahan-kesalahan dari keterbatasan-keterbatasan struktural dan politik di Misi-Misi PBB.

Pada 2000, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi ini mengakui pertanggungjawaban unik dari konflik bersenjata terhadap perempuan, dan manfaat yang menambah partisipasi perempuan dalam menjaga perdamaian, operasi-operasi PBB yang lain dan pengambilan keputusan. Dalam merancang misi berikutnya di Timor-Leste, penting bagi PBB untuk menggunakan perspektif gender, dengan melibatkan perempuan di setiap tingkatan. Meskipun hampir semua yang bertanggungjawab bagi krisis ini adalah laki-laki, para perempuan dan anak-anak menanggung beban utama berpindah mereka dari tempat tinggal.

Misi PBB berikutnya sedang dirancang dalam suasana darurat. Meskipun keprihatinan akan bantuan keamanan dan keamanan yang mendesak harus ditangani, tetapi jika penyebab krisis yang lebih dalam akan muncul kembali jika mereka tidak ditangani. Kami berharap bahwa PBB akan mendapatkan jalan yang lebih komprehensif dan efektif untuk menangani – pembangunan ekonomi, pendidikan kewarganegaraan yang luas, pemulihan dari trauma, transparansi, pengembangan kapasitas dan keadilan. Seperti dalam masa UNTAET, keamanan dan bantuan kemanusiaan bisa dikontrol dalam waktu 12 bulan, tetapi isu-isu yang lebih mendasar ini harus menjadi prioritas utama bagi PBB di Timor-Leste untuk beberapa tahun mendatang.

Dihidupkannya kembali misi PBB harus direncanakan untuk lima tahun atau lebih. Meskipun fasilitas dan dukungan internasional untuk pemilihan umum 2007 penting, pertanggungjawaban masyarakat internasional tidak harus diakhiri dengan pemilihan umum yang bebas dan adil dan pembentukan pemerintahan baru yang terpilih. Ini merupakan langkah-langkah di dalam perjalanan menuju stabilitas dan demokrasi berdasarkan konstitusi, bukanlah tujuan akhir.

Misi-misi PBB sebelumnya di Timor-Leste telah diberikan wewenang selama satu atau kurang dari satu tahun dalam satu misi. Proses ini memindahkan banyak staf internasional yang terbaik dari Timor-Leste. Saat kontrak kerja mereka hampir habis, para staf dan sukarelawan mulai mencari posisi berikutnya, orang-orang yang paling berkemampuan dan berpengalaman akan mendapatkan pekerjaan baru. Kami sangat mendorong Dewan Keamanan untuk memberikan mandat selama dua tahun kepada misi yang baru, dengan anggapan awal misi ini diperbarui, bukan dihentikan, ketika misinya telah berakhir.

Keadilan

Pemerintah Indonesia, masyarakat internasional dan pemerintah Timor-Leste telah gagal untuk mendapatkan keadilan bagi kejahatan terhadap umat manusia yang terjadi selama 24 tahun pendudukan ilegal Indonesia terhadap Timor-Leste, atau gagal menyelesaikan persentase kecil kejahatan

yang terjadi selama 1999. Catatan ini tidak akan menggambarkan frustrasi yang dalam yang dirasakan oleh para korban karena kurangnya pertanggungjawaban. Laporan Akhir CAVR menggambarkan warisannya: “Kekebalan hukum telah berakar” dan “Penghormatan terhadap negara yang berdasarkan hukum dan organ-organ negara yang bertanggungjawab dalam administrasi, sebuah tiang utama ... pembangunan bangsa di Timor-Leste akan selalu sangat rapuh dalam konteks ini.”

Kami tidak setuju dengan advokasi yang berulang-ulang mengenai “rekonsiliasi” dan “amnesti” oleh para pejabat tinggi Timor-Leste. Akan tetapi, kebanyakan para pemimpin kita ingat kejahatan berat selama 24 tahun yang terjadi terhadap rakyat kita, pada saat masyarakat internasional memutar telinganya yang tuli kepada tangisan kita untuk membantu. Kita seharusnya tidak terkejut bahwa pemerintah kita merasa tidak mampu untuk menangani satu persatu beban untuk menghukum orang-orang Indonesia yang melakukan kejahatan di bawah perintah pemerintah mereka. Masyarakat internasional belum menyelesaikan kewajibannya, dan tanggungjawab mereka terhadap kejahatan terhadap umat manusia seharusnya tidak ditinggalkan sendirian kepada Timor-Leste.

Krisis sekarang ini menunjukkan dua hasil ketiadaan pertanggungjawaban: para pelaku mengantisipasi kekebalan hukum dari kejahatan berat, dan para korban, kurang percaya diri dengan sistem peradilan, dan menangani sendiri semua persoalan. Kelemahan sistem pengadilan Timor-Leste merupakan hambatan, tetapi tanggungjawab yang ditinggalkan UNTAET dan para penggantinya merupakan masalah yang lebih besar, dan keduanya harus ditangani oleh misi PBB berikutnya. Membangun kembali kepolisian hanya akan menangani kekurangan keamanan Timor-Leste. Hingga ada kepercayaan diri yang luas pada sistem peradilan dan hukum, perdamaian dan pemerintah yang berdasarkan konstitusi di Timor-Leste akan selalu dalam situasi bahaya.

Sebagai tambahan untuk menyelamatkan keadilan dan membangun negara berdasarkan atas hukum, PBB sendiri harus memberikan contoh yang lebih baik. Status Rahasia dari Perjanjian Misi PBB yang menjamin staf PBB dan para kontraktor kebal hukum dari hukum Timor-Leste seharusnya tidak diabadikan. PBB harus berjanji untuk mengikuti hukum Timor-Leste, memutuskan contoh-contoh yang baik yang dilakukan oleh UNTAET – menyetujui pengecualian pajak ilegal untuk hotel terapung Amos W dan kurangnya pertanggungjawaban atas demonstrasi dengan kekerasan dan pembunuhan polisi di Dili pada tanggal 4 Desember 2002. Pemerintah Timor-Leste juga telah gagal untuk mempublikasikan temuan-temuannya mengenai insiden yang terjadi belakangan ini, tetapi PBB juga bertanggungjawab bagi keterbukaan informasi karena saat itu UNPOL secara luas bertanggungjawab atas PNTL.

Angkatan bersenjata

Rancangan dan pembentukan F-FDTL selama UNTAET sangat dipengaruhi oleh nasihat staf internasional. Di antara pertimbangan-pertimbangan utama adalah memberikan pekerjaan kepada veteran FALINTIL dan menghalangi serangan-serangan dari Timor Barat. Pada 1999, ketakutan atas serangan milisi mendorong CNRT untuk meninggalkan

pendiriannya bahwa Timor-Leste tidak memerlukan militer, memilih angkatan bersenjata untuk menjaga keamanan dari luar Timor-Leste. Akan tetapi, perbatasan dengan Timor Barat masih di bawah yurisdiksi kepolisian, asalkan Indonesia juga membebaskan perbatasan dari militer.

Sekarang Indonesia menerima kedaulatan Timor-Leste dan pendekatan melalui rekonsiliasi Dili ke Jakarta pada dasarnya telah mengurangi ancaman keamanan. Ancaman apa pun dari tetangga yang lain, Australia, akan ditangani dengan diplomasi. Oleh karena itu F-FDTL dengan tujuan yang tidak jelas dan tak ada musuh dari luar, mencari sesuatu untuk dikerjakan, menciptakan unit-unit intelejen untuk mendapatkan musuh, dan kadang-kadang sibuk dengan tindakan-tindakan di internal F-FDTL yang tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sah. Keputusan-keputusan jangka pendek dibuat oleh UNTAET, CNRT, dan Dewan Konstituante bisa memberikan mimpi buruk dalam jangka panjang.

Banyak prajurit-prajurit F-FDTL, termasuk para petingginya mengembangkan keahlian mereka dalam masa perlawanan dengan pendudukan Indonesia. Seperti, mereka biasanya berinisiatif dalam struktur yang desentralisasi, beroperasi secara rahasia dan independen, membagikan senjata secara klandestin dari pasar gelap. Perbedaan antara para serdadu dan masyarakat sipil tidak jelas, karena para individu bergantian peran antara sebagai anggota perlawanan yang bersenjata dan masyarakat sipil bawah tanah, seringkali diasumsikan dengan peran ganda. Meskipun taktik-taktik ini penting bagi perlawanan bawah tanah, mereka mati-matian bergabung dengan angkatan bersenjata diarahkan oleh sebuah pemerintahan sipil yang terpilih.

Selama beberapa tahun terakhir, F-FDTL menerima dukungan dari banyak sumber internasional, tetapi para pelatih dan donor tidak cukup mengakui kontradiksi-kontradiksi ini. Lebih jauh, sejak F-FDTL tidak mempunyai pertanggungjawaban konstitusional untuk keamanan dalam negeri, mereka tidak dilatih untuk berhubungan dengan masyarakat sipil, menghormati hak asasi manusia, menggunakan senjata api dengan tepat, berkoordinasi dengan PNTL atau mengerjakan tugas-tugas menjaga ketertiban. Pertanggungjawaban yang membawa petaka muncul selama bulan April dan Mei, meskipun banyak yang menyadarinya jauh sebelumnya. Ini ironi yang menyedihkan bahwa FALINTIL sebenarnya tidak pernah membunuh orang-orang sipil selama 24 tahun perlawanan terhadap pendudukan militer Indonesia, tetapi setelah empat tahun kemerdekaan dan pelatihan internasional mereka telah membalikkan senjata mereka kepada rakyat mereka sendiri.

Pemerintah Timor-Leste bersama-sama dengan PBB dan para penasihat internasional yang lain harus memberikan pemikiran dengan hati-hati terhadap peran angkatan bersenjata di masa mendatang. Peran ini harus direncanakan untuk jangka panjang, fokus pada kepentingan bangsa daripada kelembaban sejarah, persaingan atau model-model peran. Ada jalan yang lebih baik untuk menghormati para pahlawan pembebasan Timor-Leste daripada mempersiapkan mereka untuk bertempur di dalam perang yang sudah mereka menangkan dan tidak akan pernah terjadi lagi.

La'o Hamutuk telah melaporkan mengenai masalah-masalah dengan pelatihan polisi oleh internasional dan kesulitan memindahkan kewenangan UNPOL kepada PNTL,

yang disoroti pada tanggal 4 Desember 2002. Meskipun beberapa kelemahan telah dibicarakan, tetapi masalah operasional dan komando masih ada. Kami juga prihatin dengan unit-unit paramiliter kepolisian, dan senjata-senjata kaliber besar dan tidak tepat bagi PNTL yang telah dimiliki oleh masyarakat. Seperti F-FDTL, kebiasaan di masa klandestin tidak mempunyai tempat di dalam angkatan bersenjata di masa demokrasi.

Krisis saat ini menggambarkan kebutuhan pelatihan yang lebih baik bagi PNTL dalam melayani publik dan kebutuhan masyarakat sipil yang independen memantau operasi-operasi kepolisian, juga masalah-masalah dari pelatihan yang tidak konsisten oleh para penasihat dari berbagai negara yang berbeda. Polisi seharusnya tidak menjadi alat politik di belakang dan diperintah oleh para politisi tertentu. Tetapi ini tidak berarti polisi harus di bawah komando asing, seperti yang diusulkan oleh Australia. PNTL harus menjadi bagian dari pelayanan sipil dengan profesional, komandan yang netral diterima oleh semua masyarakat Timor-Leste. Menteri Dalam Negeri harus bebas dari politik, mungkin dengan dewan pemantau yang independen sama dengan dewan penasihat untuk Dana Petroleum dan fungsi-fungsi pemerintah yang sensitif lainnya.

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas

Secara tradisional, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak pernah menjadi bagian dari misi-misi PBB, tetapi jaringan yang tidak terputus antara pembangunan ekonomi dan keamanan. Dili telah digambarkan secara grafik sebagai sebuah masyarakat dengan ribuan pengangguran, pemuda yang dipinggirkan dapat dengan mudah memutar kendali jika lembaga-lembaga yang bertanggungjawab atas hukum dan peraturan tak berfungsi. Kerusakan-kerusakan yang terpisah-pisah terjadi kadang-kadang di masyarakat demokratis yang telah lama terbentuk dan makmur.

Telah banyak ditulis mengenai "perekonomian menggelembung" yang diciptakan oleh fraksi-fraksi anggaran di UNTAET dan UNMISSET yang memasuki perekonomian Timor-Leste. Faktanya, kurang dari 1% uang yang dipakai pada misi ini untuk gaji para pekerja Timor-Leste, dan bagian terbesar diterima oleh para staf internasional yang tidak pernah datang ke Timor-Leste. Lebih jauh, dalam sejarahnya administrasi PBB ini yang paling dimiliterisasikan dengan kebanyakan para staf dan mayoritas uang dialokasikan untuk angkatan bersenjata.

Karena PBB menambah kehadirannya di Timor-Leste, PBB harus merangsang perekonomian lokal yang miskin. Di masa lalu, PBB mengimpor bahan persediaan dan layanan dari luar negeri, menghilangkan kesempatan diperuntukkan bagi Timor-Leste untuk menggunakan uang di dalam negeri. Prioritas diberikan untuk air bersih, listrik dan komunikasi untuk mendukung operasional PBB daripada mendukung penduduk ibukota atau bangsa ini. Jika PBB memberikan pemikiran yang lebih terhadap perekonomian dengan orientasi waktu yang lebih lama, pembangunan ekonomi Timor-Leste sekarang akan semakin kuat, karena para pengusaha dan layanan-layanan umum melonjak dengan pembelanjaan PBB yang berlanjut akan menciptakan lapangan kerja.

Area lain dimana PBB dan agen-agen bantuan dapat mendukung dengan mempromosikan pekerjaan bagi publik. Untuk alasan ideologi, Bank Dunia dan lembaga-lembaga

yang lain telah mendesak Timor-Leste meminimalkan pekerjaan di sektor publik. Tetapi sejak pengangguran menciptakan ketidakstabilan dan sejak devisa minyak Timor-Leste dapat membayar para pegawai negeri, tidak ada alasan yang masuk akal untuk tidak mempekerjakan orang-orang di fungsi-fungsi yang diperlukan, seperti pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan sekolah, pemberian perawatan kesehatan dan listrik di pedesaan. Saat negara-negara seperti Amerika Serikat mengalami tingkat pengangguran pada 1930-an sama seperti Timor-Leste sekarang, mereka menciptakan badan-badan pemerintah untuk mempekerjakan orang-orang di bidang pekerjaan umum dan infrastruktur. Misi PBB dapat mempekerjakan orang-orang Timor-Leste dalam jumlah besar dengan kontrak-kontrak sementara, menempatkan keahlian-keahlian mereka untuk hal-hal yang produktif, menambah keinginan berpartisipasi mereka di dalam masyarakat, memberikan keahlian dan pengalaman kerja, dan mengarah pada beberapa pekerjaan jangka panjang.

Pemerintah Timor-Leste mempunyai kesulitan-kesulitan mengatur program dan proyek, sebagian karena tidak cukupnya dalam proses peningkatan kapasitas, prosedur anti korupsi yang terlalu ketat dan sentralisasi yang berlebihan. PBB dapat membantu dengan program pekerjaan-pekerjaan umum yang diperluas dengan memberikan pelatihan dan nasehat dan dengan membantu merancang prosedur yang diperbaiki dan mendesentralisasikannya.

Semua kegiatan-kegiatan semacam ini harus dilakukan dalam koordinasi yang dekat dengan pemerintah Timor-Leste, dan para staf internasional dan konsultan yang melaksanakan program itu seharusnya mempunyai keahlian yang tepat dalam mengajar dan pendampingan. Mereka harus bertanggung jawab kepada kebutuhan Timor-Leste, daripada kebutuhan struktur organisasi dan para pengawas yang jauh dari mereka di Kantor Pusat PBB sana.

Misi-misi PBB sebelumnya mempunyai kelemahan-kelemahan secara struktural yang menjual usaha mereka dengan murah untuk memperkuat lembaga-lembaga negara: kontrak jangka pendek dan terlambat dalam merekrut para penasihat internasional. Dalam pemerintah yang stabil, ini membutuhkan 10 tahun atau lebih bagi para pegawai negeri untuk mendapatkan pengalaman yang cukup untuk mengelola sebuah departemen, belajar dari pengawasnya dan seluruh staf yang lain. Tetapi di Timor-Leste, para pendamping dan penasehat datang dan pergi beberapa kali setahun, tanpa waktu yang cukup untuk memahami sepenuhnya lembaga-lembaga atau orang-orang yang bekerja dengannya. Waktu yang penting hilang untuk terlambatnya rekrutmen, dan para penasehat hampir habis kontrak jangka pendeknya diganggu dengan tugas mereka berikutnya.

Pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi

Salah satu akar masalah krisis adalah masyarakat dan para pejabat pemerintah Timor-Leste tidak percaya diri menggunakan metode-metode menurut konstitusi dalam penyelesaian perselisihan. Ini tidak mengherankan, karena kebanyakan warga negara Timor-Leste tidak pernah hidup dalam demokrasi yang berfungsi dengan baik dimana isu-isu diperdebatkan dengan damai. Pendidikan kewarganegaraan yang luas diperlukan tidak hanya dengan mengajari mekanisme

proses pemilihan umum, tetapi untuk meyakinkan masyarakat bahwa proses pemilihan umum mendukung kepentingan-kepentingan seluruh masyarakat dalam jangka panjang, tanpa memandang siapa yang menang dalam jangka pendek.

Ketidakefektifan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan oleh masyarakat internasional di masa sebelumnya dan perkembangan partai politik di Timor-Leste dapat dilihat dari hasil-hasil yang ada. Debat-debat politik dilakukan dengan menyerang pribadi orang, daripada memperdebatkan isu-isu utamanya. Para politisi menyerang integritas lawan politiknya, daripada menawarkan kebijakan-kebijakan alternatif. Para pemberi suara yang tidak puas menghina atau menyerah dengan wakil-wakil yang mereka pilih, daripada meyakinkan mereka untuk mengubah pandangan-pandangan mereka. Para pemimpin politik sangat patuh pada pemimpin partainya atau pelindung mereka, daripada melihat orang-orang yang berhak memilih. Liputan media memperkuat tuduhan-tuduhan pribadi dan tuduhan balasan, tanpa analisa atau fakta-fakta untuk membantu para pembaca atau pengamat memutuskan apa yang benar. Ada masalah-masalah mendasar, yang tidak dapat diperbaiki dengan pelatihan mengenai Undang-Undang Pemilihan Umum. Tetapi masalah-masalah ini harus diarahkan jika Timor-Leste hendak bertahan sebagai sebuah bangsa yang stabil, dimana hak asasi manusia dihormati dan pertanyaan-pertanyaan yang diperdebatkan diselesaikan secara damai dan demokratis.

Karena PBB bekerja untuk menegakkan kembali negara atas hukum, PBB juga harus memperhatikan peningkatan kesadaran para pemimpin dan masyarakat umum bahwa debat politik secara sehat, fokus pada isu-isu dan saling menghormati dan tanpa kekerasan merupakan bagian penting dari demokrasi. Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya mengingatkan para pejabat pemerintah bahwa kekuasaan mereka diperoleh dari persetujuan yang dipengaruhi, dan sesungguhnya mereka harus menggunakan kekuasaan negara untuk melayani rakyat, bukan diri mereka sendiri. Rekonsiliasi penting antar individu dan lembaga-lembaga yang dulunya bertentangan, tetapi rekonsiliasi harus digabungkan dengan kompromi dan kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan para pihak, bukan hanya permintaan maaf, ganti rugi, dan pengampunan dan ini semua tidak bisa menggantikan keadilan.

Kesimpulan

Pembangunan sebuah bangsa selalu sulit, dan Timor-Leste memulainya dengan kekurangan yang sangat besar akibat dari kejahatan internasional dan pengabaian secara sengaja oleh masyarakat internasional sebelum 1999. Bangsa baru di abad millennium ini sebelumnya merupakan sebuah "poster anak-anak" bagi kesuksesan keterlibatan masyarakat internasional, tetapi Timor-Leste juga telah menjadi seekor babi percobaan bagi proyek-proyek. Kami berharap bahwa krisis sekarang ini dianggap sebagai sebuah panggilan peringatan, dan misi PBB berikutnya akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan jangka panjang dari sejuta orang yang tinggal di Timor-Leste, mengatasi praktek-praktek kelembagaan dan ketegangan-ketegangan biasa demi mendukung usaha-usaha mereka untuk hidup dalam stabilitas, demokrasi, dan perdamaian. ❖

Editorial: Undang-undang Pensiun yang Rakus

(Lanjutan hari halaman 24)

UU Pensiun untuk mantan pejabat pemerintah menyebutkan bahwa:

- mereka juga akan menerima 100% dari gajinya setiap bulan, perawatan medis gratis di dalam atau luar negeri, dan paspor diplomatik.
- Impor bebas pajak satu mobil setiap lima tahun, dan semua bahan untuk membangun satu rumah pribadi.
- Di samping ini, pemerintah akan menyediakan
 - ◆ satu mobil pribadi, lengkap dengan sopir dan bensin
 - ◆ satu rumah lengkap dengan pengamanan
 - ◆ seorang asisten dan sekretaris pribadi
 - ◆ sebuah kantor lengkap dengan internet, dua telpon dan satu HP
 - ◆ dua perjalanan ke luar negeri setiap tahun, dengan dua pendamping.

Semua hak istimewa ini diberikan kepada setiap mantan anggota parlemen yang menjalankan tugasnya paling sedikit selama 3½ tahun dan kepada mantan pejabat pemerintah yang menjalankan tugasnya paling sedikit selama 4 tahun. Pejabat resmi yang belum bekerja selama empat tahun akan menerima tunjangan sebanding dengan jangka waktu ketika mereka bekerja.

Negara-negara lain

Anggota-anggota Parlemen sering mengatakan bahwa UU ini mirip dengan yang digunakan di negara-negara lain. Pada kenyataannya, di kebanyakan negara maju ada aturan yang tidak terlalu dermawan tentang berapa banyak pensiun yang diterima seorang mantan anggota parlemen, kapan itu akan diterima, berapa tahun tugas mesti dijalankan dan berapa persen harus dibayarkan dana pensiun sementara mereka masih bekerja dan menerima gaji.

Seorang anggota Kongres Amerika Serikat bisa mendapat maksimum 80 persen dari gajinya, kalau dia menjalankan tugas selama duapuluh tahun atau lebih. Tetapi, pensiun itu hanya akan diterima ketika umurnya cukup tua untuk berhenti bekerja. Mereka yang bertugas selama hanya lima tahun, seperti anggota kita, akan menerima di bawah 10 persen dari gajinya, dan hanya ketika umurnya mencapai 62 tahun. Karena masa jabatan seorang anggota Kongres adalah dua tahun, dia perlu dipilih tiga kali untuk mendapat jangka waktu lima tahun. Seorang yang hanya dipilih satu kali, seperti anggota Parlemen Timor-Leste, akan menjalankan tugas selama dua tahun dan tidak akan menerima pensiun.

Di kebanyakan negara yang memakai sistem pensiun, anggota parlemen harus memberikan bagian yang cukup besar dari gaji mereka sementara mereka masih bekerja ke dalam dana pensiun yang akan dibayarkan kembali ketika mereka berhenti bekerja.

Contohnya, di Portugal para anggota Majelis Republik membayar 6% dari gajinya ke dalam dana pensiun, dan akan berhak menerima pensiun yang mirip pensiun untuk pegawai negeri lain setelah menjalankan tugas selama lima tahun. Di

Australia potongan gaji adalah 11.5% untuk 18 tahun yang pertama, dan 5.75% untuk masa jabatan di atas 18 tahun. Kalau mereka berhenti bekerja kurang dari 8 tahun mereka tidak dapat pensiun sama sekali; di atas 8 tahun mulai dengan 50% dari gaji sampai dengan maksimum 75% dari gaji kalau sudah menjalankan tugas selama 18 tahun. Pensiun mulai dibayar pada usia 55 tahun.

Di negara yang kaya seperti Norwegia, yang mempunyai sistem kesejahteraan sosial yang kuat, anggota parlemen yang sudah berhenti bekerja menerima sampai 66% dari gajinya (setelah 12 tahun menjalankan tugas), dibayarkan mulai pada umur 65 tahun. Denmark menuntut 8 tahun tugas dan mulai membayar pensiun pada usia 67 tahun.

Pada 1998, Parlemen Mozambique mengatur sebuah UU Pensiun yang sangat dermawan untuk para anggotanya. RUU itu diveto oleh Presiden Joaquim Chissano dengan catatan “RUU ini mesti diperiksa kembali oleh Majelis karena menurut pendapat saya bisa membuat pengaruh sosio-ekonomis yang negatif dan sulit untuk bisa dipenuhi secara keuangan.” Chissano mendesak utusannya untuk memeriksa “keberlanjutan ekonomis dan sosial” usulan mereka dan bagaimana melaksanakannya itu “dengan dasar keadilan sosial.” Empat tahun kemudian Parlemen mengesahkan UU pensiun lain, yang memberikan kepada setiap utusan yang menjalankan tugas dua periode masa jabatan (sepuluh tahun) 100% dari gajinya ketika dia mencapai usia 60 tahun untuk laki-laki atau 55 tahun untuk perempuan. Para utusan yang hanya menjalankan tugas satu periode masa jabatan (lima tahun) tidak akan menerima pensiun, tetapi mereka berhak mendapat “tunjangan integrasi kembali” sebesar 50% dari gaji pokok untuk setiap tahun bekerja dalam Majelis. Selama aktif dalam Parlemen, seorang utusan membayar 13% dari gajinya ke dalam dana pensiun – walaupun dana tersebut cuma menutupi seperdelapan dari total dana pensiun. Jika seorang utusan membayar tambahan 1,5% dari gaji pokoknya, dia juga berhak menerima perawatan medis gratis dari Pelayanan Kesehatan Nasional Mozambique, atau evakuasi ke luar negeri.

Parlemen bekerja untuk siapa?

Setelah melihat berbagai negara lain, *La'o Hamutuk* berpendapat bahwa para Anggota Parlemen Timor-Leste telah memberikan pada diri mereka sendiri sesuatu pensiun yang paling dermawan di dunia. Mereka menarik keuntungan dari ketidakpastian dalam situasi yang sekarang ada, daripada mengikuti prosedur yang adil dan transparan. Sementara kebanyakan orang sedang berjuang untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya dari kekerasan dan kebakaran, para anggota Parlemen telah mengesahkan UU yang menguntungkan mereka sendiri dan mantan pejabat lain yang menjalankan tugas kurang dari lima tahun.

Kita semua tahu bahwa Timor-Leste adalah negara yang paling miskin di wilayah Asia Pasifik. Kebanyakan orang Timor-Leste hanya menerima 50 sen per hari, dan ada banyak yang belum punya penghasilan harian. Standar hidup kita di bawah garis kemiskinan. Banyak orang di Timor-Leste cuma bisa makan satu kali setiap hari.

Kenyataan yang sebenarnya ialah bahwa Timor-Leste mempunyai angka kematian bayi dan kematian ibu yang paling tinggi di dunia. Menurut Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2006, angka kematian bayi di Timor-Leste 64 orang per 1.000, dan angka kematian ibu 660 orang per 100.000. Jika kita mau Timor-Leste punya masa depan yang kuat kita harus meningkatkan investasi untuk anak dan ibu kita, memperbaiki gizi dan pelayanan kesehatan mereka. Fasilitas kesehatan kita di daerah masih belum cukup, kita mesti membangunkannya untuk kesejahteraan semua orang di Timor-Leste. Walaupun Parlemen mungkin sudah lupa, itulah janji dalam Pasal 17 dari Konstitusi kita, yang menyatakan bahwa semua perempuan dan laki-laki punya hak dan kewajiban yang sama dalam semua bagian dari kehidupan keluarga, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Banyak anak yang tidak bisa dapat pendidikan oleh karena orangtua mereka tidak punya pekerjaan dan tidak ada uang untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Di daerah, kebanyakan sekolah belum berfungsi dengan baik. Bahkan di ibukota kita sistem pendidikan belum dibangun dengan bagus, dan cuma beberapa orang punya kemungkinan untuk pergi kuliah di negara lain. Pemerintah tidak mempunyai mekanisme untuk memberi beasiswa kepada anak-anak berprestasi yang tidak punya cukup uang untuk pergi ke sekolah, atau meneruskan studi mereka di universitas. Masyarakat muda kita tidak punya pekerjaan, dan itu mempengaruhi konflik yang kita alami di Timor-Leste saat ini.

Bulan Desember yang lalu seorang anggota dari Timor Teknis yang sedang melanjutkan penilaian polisi Timor-Leste menyatakan di dalam rapat umum *La' o Hamutuk* bahwa anggota-anggota PNTL tidak bisa melaksanakan tugas mereka dengan efektif karena fasilitas mereka. Mereka juga punya gaji yang sangat rendah, sama sekali belum cukup untuk mendukung keluarga mereka, yang mendorong mereka untuk jadi terlibat dalam aktivitas ilegal. Pasti itu akan mempengaruhi penegakan hukum di negara kita.

Jika UU Pensiun ini disahkan, Parlemen dan Pemerintah bukan lagi tempat untuk membuat dan mengimplementasi kebijakan publik; melainkan akan menjadi tempat untuk beberapa orang bergabung dengan kelas atas. Orang akan menjadi anggota Parlemen atau Menteri karena mau menaikkan statusnya, menjadi kaum elit, tidak membuat apa pun namun menerima uang dan hak-hak istimewa.

UU ini menunjukkan pada kita bahwa para politikus kita menyalahgunakan demokrasi. Demokrasi berarti kedaulatan terletak di tangan masyarakat, dan kekuasaan politik yang kita serahkan kepada parlemen mesti digunakan untuk melayani masyarakat – bukan suatu kelompok elit. Apa yang dibuat oleh wakil-wakil kita dengan UU ini sama sekali tidak menunjukkan pertimbangan atau hormat kepada para pemilik kedaulatan negeri kita, masyarakat Timor-Leste.

Oleh karena itu kami menganggap ini sebagai korupsi politik, karena ini adalah UU untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Ini jadi bukti bahwa demokrasi kita cuma pajangan dan dalam kenyataannya para anggota parlemen telah kembali ke “**Baino-krasi**” (kekuasaan oleh kaum elit).

Penelitian *La' o Hamutuk* menemukan bahwa UU ini lebih rakus daripada standar-standar internasional umum untuk UU Pensiun. Di hampir semua negara pensiun di bawah 100% gaji, dan tidak dibayarkan sebelum orang mencapai umur berhenti kerja. Juga, orang harus bekerja banyak tahun sebelum mereka berhak menerima pensiun yang signifikan, dan mereka membayar bagian dari gaji ke dalam dana pensiun.

Di bawah RUU Timor-Leste orang yang tidak bekerja, yang tidak memberi kontribusi pada pembangunan negara ini, akan mencuri uang dari negara kita. Banyak anggota Parlemen Timor-Leste punya karir lain – mereka juga bekerja sebagai pengusaha, dosen dan konsultan – dan tidak masuk akal bahwa mereka menerima pensiun negara sementara mereka masih hidup secara produktif.

Berdasarkan analisa kami di atas, kami ingin membuat beberapa rekomendasi:

- √ Parlemen Nasional mesti memeriksa kembali UU tersebut dengan pertimbangan terhadap dasar keberlanjutan sosial, ekonomi dan keuangan kita.
- √ Harus ada diskusi umum untuk setiap RUU dari Parlemen, yang harus menerima pertimbangan dari masyarakat.
- √ Parlemen harus mendengarkan suara dari yang memilih mereka, dan menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal kita, termasuk pertanian, irigasi, pemasaran produk-produk lokal, pendidikan untuk semua, dan dukungan secukupnya pada PNTL.
- √ Daripada membayar pelayanan kesehatan khusus di luar negeri untuk mantan anggota Parlemen dan pejabat resmi, menurut pendapat *La' o Hamutuk* uang itu harus digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan di dalam negara kita, khususnya di daerah, karena itu akan membantu jauh lebih banyak orang. Sementara kebanyakan orang Timor-Leste cuma punya sedikit akses untuk pelayanan kesehatan, mantan pejabat resmi tidak semestinya punya hak-hak istimewa.
- √ Mengevaluasi dan menjalankan rencana pensiun untuk semua pegawai negeri, yang juga termasuk anggota Parlemen, pejabat resmi tinggi dan pekerja lain di Timor-Leste, daripada menjalankan program pensiun-pensiun khusus untuk mereka sendiri dan beberapa lain saja.
- √ Berlaku untuk semua rencana pensiun, orang yang sehat tidak semestinya menerima pensiun sementara mereka masih cukup muda.

Presiden Republik tidak boleh mengesahkan UU ini, yang memperbolehkan beberapa orang memanen kekayaan negara ini sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Jika tidak dihentikan, ini akan menjadi korupsi oleh parlemen nasional, menggunakan uang negara.

Kami masih berharap bahwa anggota Parlemen akan melayani kepentingan masyarakat yang memilih mereka. Tetapi kalau Parlemen tetap akan promosikan UU ini, kami yakin bahwa pemilih akan kehilangan kepercayaan pada anggota-anggotanya, dan tidak akan memilih kembali mereka pada pemilu yang akan datang. ❖

Editorial: Parlemen Nasional, Jangan Sahkan Undang-undang Pensiun yang Rakus

Parlemen Nasional Timor-Leste baru saja meloloskan dua undang-undang (UU) yang akan mengatur pensiun dermawan untuk para mantan anggota parlemen dan mantan pejabat resmi (*ex-titulares de Órgãos de Soberania*), seperti Presiden Negara, Presiden Parlemen Nasional, Perdana Menteri, dan pejabat pemerintah. Sementara UU ini dibuat, krisis politik dan keamanan meliputi negara ini dengan ratusan ribu orang menjadi korban, dan mereka pengungsi ke seluruh negeri. Motivasi UU ini jelas: masa jabatan lima tahun untuk anggota parlemen sudah hampir habis. Sementara artikel ini ditulis pada bulan Februari, Presiden Republik baru memveto UU tersebut dan mengirimkan kembali ke Parlemen untuk direvisi.

Rancangan undang-undang ini tidak menarik banyak perhatian sampai saat Presiden memveto UU untuk mantan anggota Parlemen pada awal Desember. Setelah itu beberapa LSM memulai berbagai aktivitas, termasuk forum umum, untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang UU Pensiun. RUU tersebut tidak melalui dengar pendapat umum seperti halnya Parlemen tidak mau mendengar pendapat masyarakat. Anggota-anggota parlemen juga menolak untuk ikut serta dalam diskusi-diskusi atau untuk berbagi informasi tentang UU tersebut dengan masyarakat, dengan alasan bahwa UU itu sudah diloloskan oleh Parlemen Nasional sehingga diskusi harus menunggu sampai setelah presiden mengesahkannya. Hanya dua minggu kemudian, Parlemen telah mengirim kepada presiden sebuah RUU pensiun yang lain, kali ini untuk mantan pejabat tinggi pemerintah. Forum LSM Timor-Leste (Fongtil) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional awal bulan Januari telah mengorganisir sebuah seminar tentang kedua UU ini, yang dihadiri oleh Anggota Parlemen Manuel Tilman dari juga KOTA.

UU Pensiun untuk mantan pejabat telah diveto oleh Presiden pada tanggal 22 Januari. Menurut pendapat *Suara Timor Lorosa'e*, Xanana Gusmão memveto UU ini karena “tidak ada alasan dasar untuk merancang UU tersebut, UU ini tidak punya landasan konstitusional.” Mestinya mereka merancang UU dengan menetapkan siapa yang dimaksudkan sebagai pejabat tinggi (“titulares”) sebelum diproses menjadi UU Pensiun. Surat veto dari Presiden dibacakan di dalam sidang pleno Parlemen yang diketuai oleh Wakil Presiden Parlemen, Jacob Fernandes.

Isi kedua UU menunjukkan bahwa para anggota Parlemen hanya berpikir tentang bagaimana membuat hukum yang menjamin masa depan mereka dan anggota lain dari pemerintah yang hanya menjalankan masa tugas lima tahun. Itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak sensitif terhadap krisis saat ini – mereka tidak merasakan penderitaan ratusan ribu orang yang menjadi pengungsi dan hidup dalam kamp-kamp pengungsi, atau dari mereka yang telah meninggal dunia karena konflik ini.

Sangat dermawan – untuk diri mereka sendiri

UU Pensiun untuk mantan anggota parlemen menyebutkan bahwa:

- mantan anggota Parlemen akan tetap menerima 100 persen gaji seumur hidupnya, mulai ketika mereka selesai tugas, dan penerimaan akan naik dengan kenaikan gaji parlemen di masa mendatang.
- pemerintah akan membayar perawatan medis di dalam atau di luar Timor-Leste jika dokter menyarankan.
- tanpa membayar pajak import, mereka bisa mengimpor satu mobil untuk dipakai pribadi dan semua bahan untuk membangun satu rumah pribadi.
- mereka berhak mendapat paspor diplomatik untuk mereka sendiri dan keluarga, dan “perjalanan bebas” ketika mereka perlu berpergian di dalam atau keluar negeri.

(bersambung ke halaman 22)

Apakah La'ó Hamutuk itu?

La'ó Hamutuk (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor-Leste yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La'ó Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La'ó Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, *La'ó Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf *La'ó Hamutuk* baik itu staf Timor-Leste maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La'ó Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor-Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

La'ó Hamutuk mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. *Buletin* dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La'ó Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

Dalam semangat mengembangkan transparansi, *La'ó Hamutuk* mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor-Leste serta masyarakat internasional.